

BerAKHLAK

2025



LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Jalan Wonosari - Yogyakarta Km.03 Siyono Wetan, Logandeng, Playen 55861

(0274)391440 Posel: lh@gunungkidulkab.go.id

Laman: lh.gunungkidulkab.go.id



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah.

Akuntabilitas kinerja merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang baik untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil bisa optimal serta cara-cara yang digunakan untuk mencapainya.

Akuntabilitas dalam bentuk laporan dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi karena pencapaian suatu tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi yang akan terlihat jelas pada pencapaian sasaran.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LkjiP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Wonosari, 31 Januari 2026

KEPALA,



EDY BASUKI, M.Si

NIP. 196810091996031003



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumberdaya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai konsekuensi pelaksanaan manajemen kinerja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025 dalam mewujudkan tujuan strategis digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian Tujuan 1 "Meningkatnya Tata Kelola Lingkungan Hidup"
Diukur dengan indikator "Nilai Peningkatan tata kelola lingkungan hidup"
Realisasi tahun 2025 sebesar 95,37% dari target sebesar 95,27% atau tingkat capaian 100,10%, melampaui target yang telah ditetapkan
2. Capaian Tujuan 2 "Meningkatnya Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup"
Diukur dengan indikator "Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan"
Realisasi tahun 2025 sebesar 73,61% dari target sebesar 58,55% atau tingkat capaian 125,72 dari target yang ditetapkan
3. Capaian sasaran strategis 1 "Terwujudnya Tata Kelola Lingkungan Hidup":
Diukur dengan indikator Nilai Peningkatan tata kelola lingkungan hidup.
Capaian indikator didukung oleh kinerja 6 program diantaranya: Program Pengendalian Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Persampahan, Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), dan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang
- Target sasaran pada tahun 2025 adalah 95,27 dan hingga bulan Desember 2025 mencapai realisasi sebesar 95,37% dengan



capaian kinerja mencapai 100,10% masuk kategori sangat tinggi. Meskipun belum melampaui target.

- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2024 sebesar 95,26% terjadi penurunan sebesar 0,11%

4. Capaian sasaran strategis 2 "Terwujudnya Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup"

Diukur dengan indikator Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan.

Capaian indikator ini didukung oleh 3 program diantaranya, Program perencanaan lingkungan hidup penanganan pengaduan lingkungan hidup, Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan pengelolaan lingkungan hidup.

- Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 58,55% sampai dengan akhir bulan desember terealisasi 73,61%. Dengan demikian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target mencapai 125,72%.
- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2024 sebesar 58,32% terjadi kenaikan sebesar 15,29%

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul ke depan, sebagai berikut:

1. Tingginya produksi sampah dan timbulan sampah dari waktu ke waktu
2. Terjadinya alih fungsi lahan
3. Perubahan iklim yang signifikan
4. Tingkat ketaatan lingkungan masih rendah
5. Pembuangan limbah ke sungai yang masih tinggi
6. Belum semua masyarakat dapat melaksanakan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) terhadap sampah rumah tangga.
7. Peralatan modern armada pengangkut sampah yang kurang memadai, dari segi kuantitas juga belum memenuhi.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Cascading Kinerja Sebagai Dasar Pembentukan Perangkat Daerah .	2
C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi	3
D. Tugas dan Fungsi	4
E. Permasalahan Utama (Strategic Issued)	5
F. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah	9
B. Strategi dan Arah Kebijakan	11
C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025	12
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	16
E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
A. Capaian Kinerja Tahun 2025	25
B. Capaian Kinerja Lainnya	59
C. Efisiensi Anggaran	62
D. Inovasi	64
BAB IV PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Langkah Perbaikan Kinerja	68
LAMPIRAN	69



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi.....	6
Tabel 1. 2 Sarana-Prasarana	7
Tabel 1. 3 Anggaran Dinas Lingkungan Hidup 2025	8
Tabel 2. 1 Sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul 2021-2026.....	10
Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama	13
Tabel 2. 3 Strategi dan Arah Kebijakan.....	11
Tabel 2. 4 Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025	12
Tabel 2. 5 Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2025.....	15
Tabel 2. 6 Indikator Kinerja Program.....	15
Tabel 2. 7 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025	16
Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul 2025.....	17
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	25
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2025.....	25
Tabel 3.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan.....	26
Tabel 3.4 Capaian Sasaran Terwujudnya Tata Kelola Lingkungan Hidup.....	27
Tabel 3.5 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021-2023 serta perbandingan dengan target akhir Renstra di tahun 2026	27
Tabel 3.6 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan.....	28
Tabel 3.7 Data Perusahaan Pengguna SIMPEL Tahun 2024.....	29
Tabel 3.8 Neraca Sampah SIPSN.....	34
Tabel 3.9 Data Bank Sampah dan Adiwiyata tahun 2024.....	39
Tabel 3.10 Luas RTH Kab Gunungkidul.....	45
Tabel 3.11 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan.....	49
Tabel 3.12 Capaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	49
Tabel 3.13 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil SAKIP Tahun 2023	50
Tabel 3.14 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2022 serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di Tahun 2026.....	50
Tabel 3.15 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan.....	50
Tabel 3.16 Capaian Kinerja Program Penunjang.....	51
Tabel 3.17 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan.....	52
Tabel 3.18 Rumusan Perhitungan.....	52
Tabel 3.19 Capaian Sasaran Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Meningkatkan.....	52
Tabel 3.20 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2025 serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di Tahun 2026.....	53
Tabel 3.21 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan.....	53
Tabel 3.22 Capaian Kinerja Program	54
Tabel 3.23 Tabel Pengawasan.....	55



Tabel 3.24 Tabel Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup	<u>56</u>
Tabel 3.25 Efisiensi Anggaran Program dan Kegiatan	<u>62</u>



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Cascading Kinerja Sebagai Dasar Pembentukan Perangkat Daerah.....	2
Gambar 1.2 Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi.....	4
Gambar 2. 1 E-SAKIP.....	18
Gambar 2. 2 SiPANDA	19
Gambar 2. 3 DATA.....	19
Gambar 2. 4 E-Planning.....	20
Gambar 2. 5 LPSE.....	20
Gambar 2. 6 SiRUP.....	21
Gambar 2. 7 SIPD-RI	21
Gambar 2.8 SIPD Penatausahaan.....	22
Gambar 2.9 DATAKU.....	22
Gambar 2.10 SIPAKGK.....	23
Gambar 2.11 SIM Aset.....	23
Gambar 2.12 Instagram, website, dan youtube Dinas Lingkungan Hidup.....	24
Gambar 3.1 Kegiatan Program Pengendalian Pencemaran	34
Gambar 3. 2 Kegiatan Program Pengelolaan Sampah.....	36
Gambar 3. 3 Kegiatan Program Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.....	44
Gambar 3.4 Dokumentasi Kegiatan Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.....	46
Gambar 3.5 Dokumentasi Kegiatan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta.....	47
Gambar 3. 6 Kegiatan Pengawasan & Penanganan Pengaduan.....	57
Gambar 3.7 Sarana dan Prasarana Bagi Kelompok Rentan.....	60
Gambar 3.8 Sarana Bermain Anak di Taman Kota.....	62



BAB I berisi:

- A. Latar Belakang
- B. Cascading Kinerja
- C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi
- D. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan
- E. Permasalahan Utama (Isu Strategis)
- F. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Setiap Perangkat Daerah wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

LKjIP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya *good governance* serta berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Bertitik tolak dari Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 dan Rencana Kinerja Tahunan 2025, maka LKjIP Dinas Lingkungan Hidup

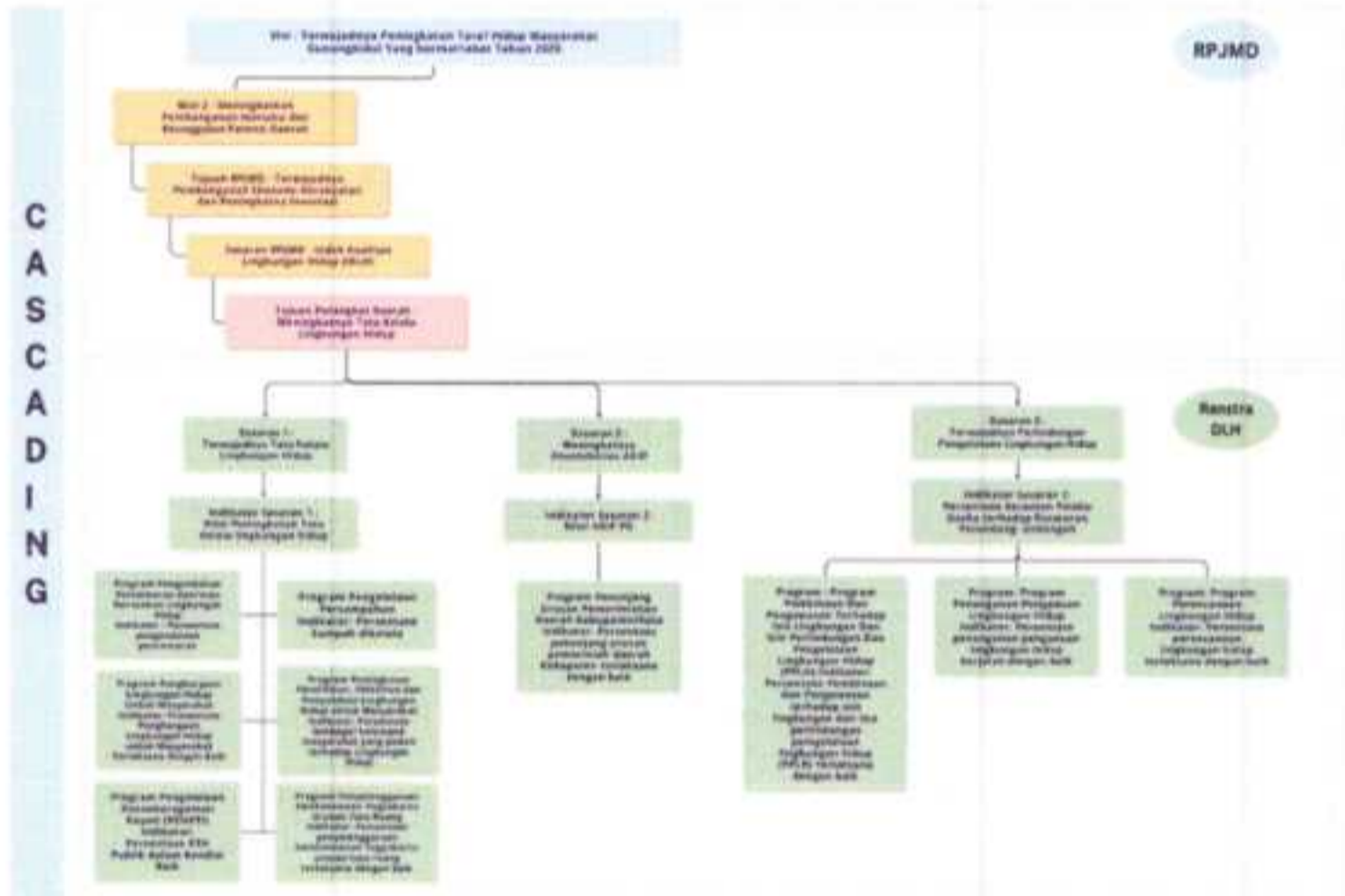


Kabupaten Gunungkidul yang disusun merupakan realisasi hasil kegiatan tahun 2025 dan menyajikan laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan.

B. Cascading Kinerja Sebagai Dasar Pembentukan Perangkat Daerah

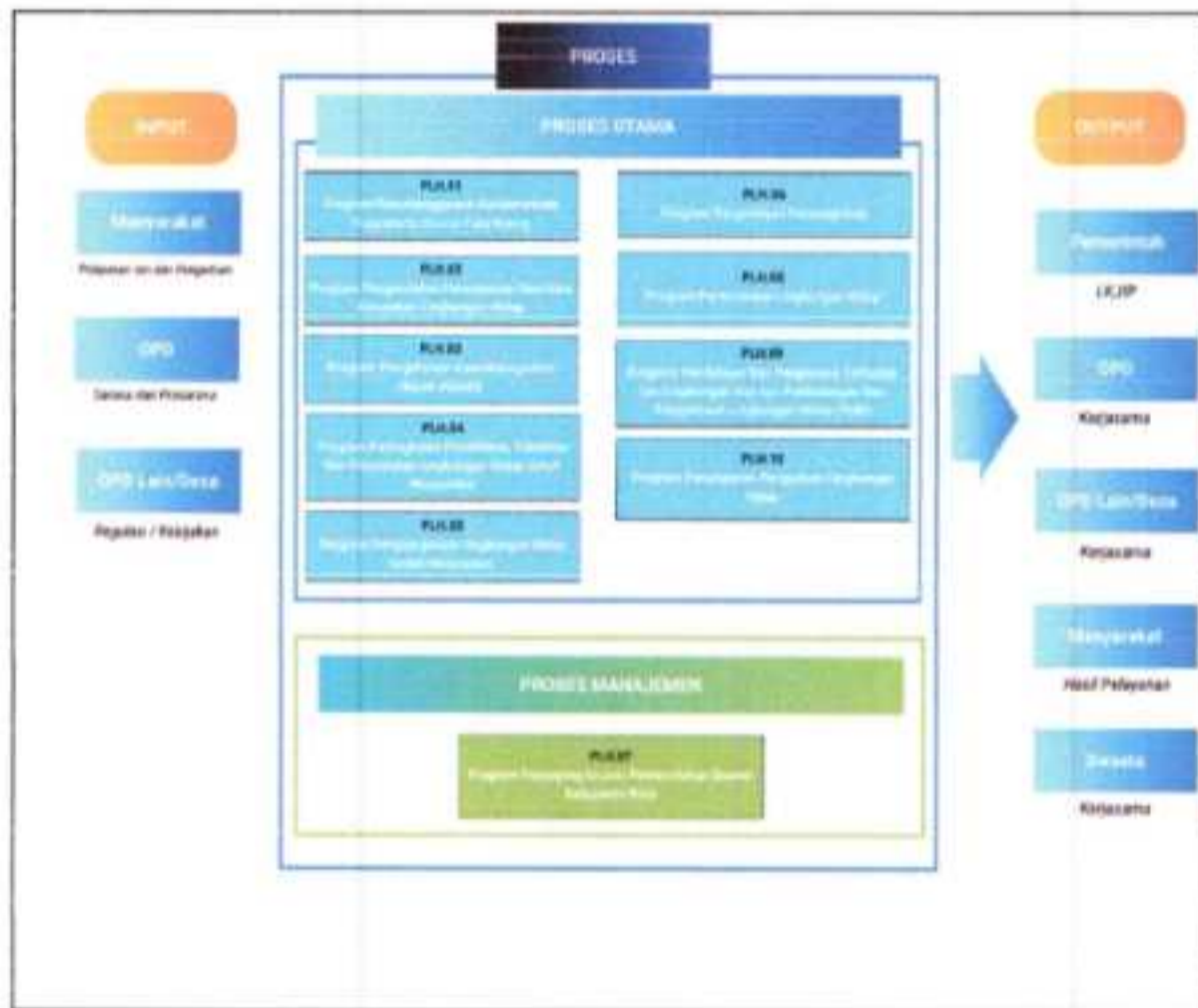
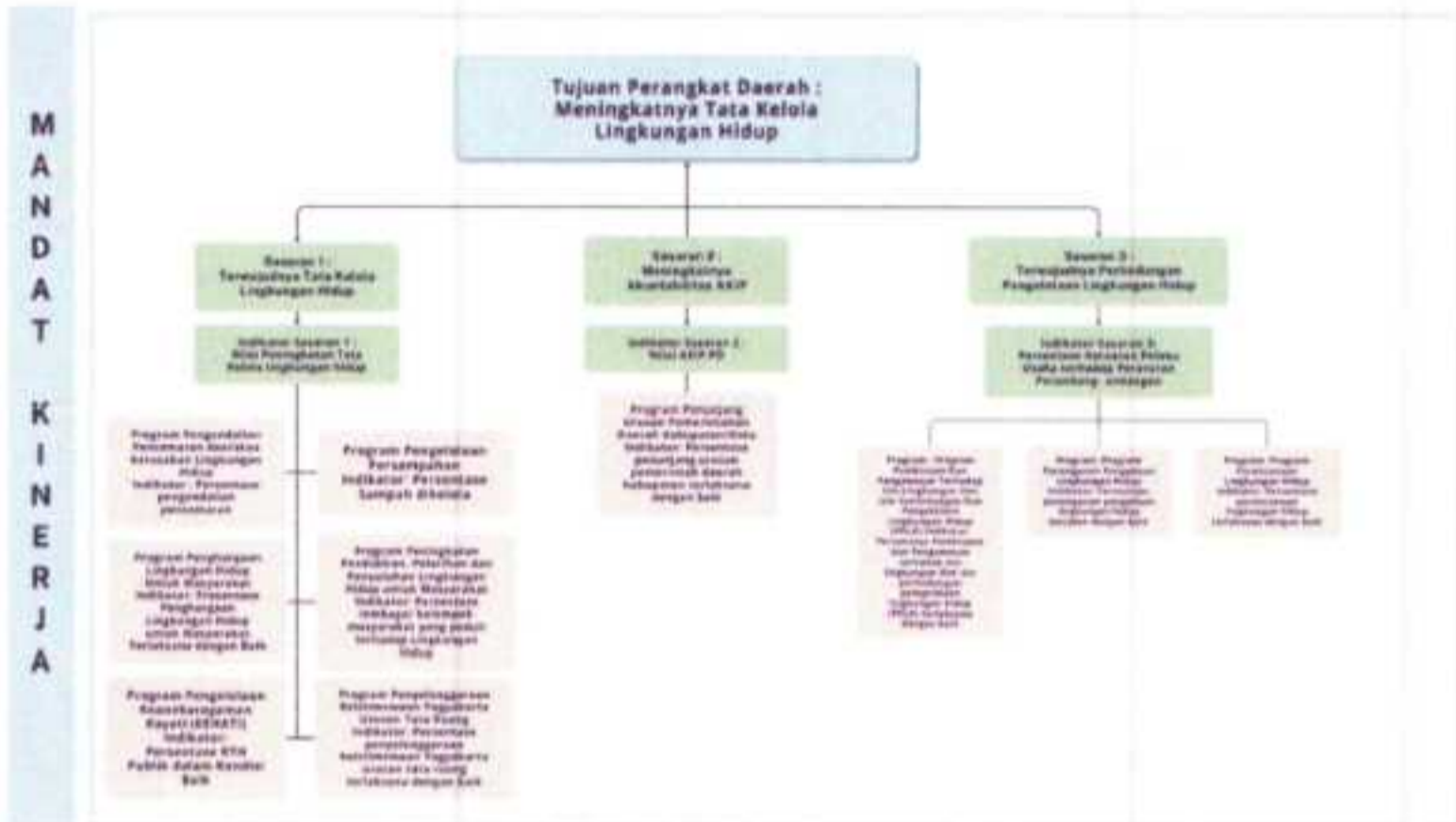
Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (Performance Based Organization) yang diterapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2021 – 2026. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

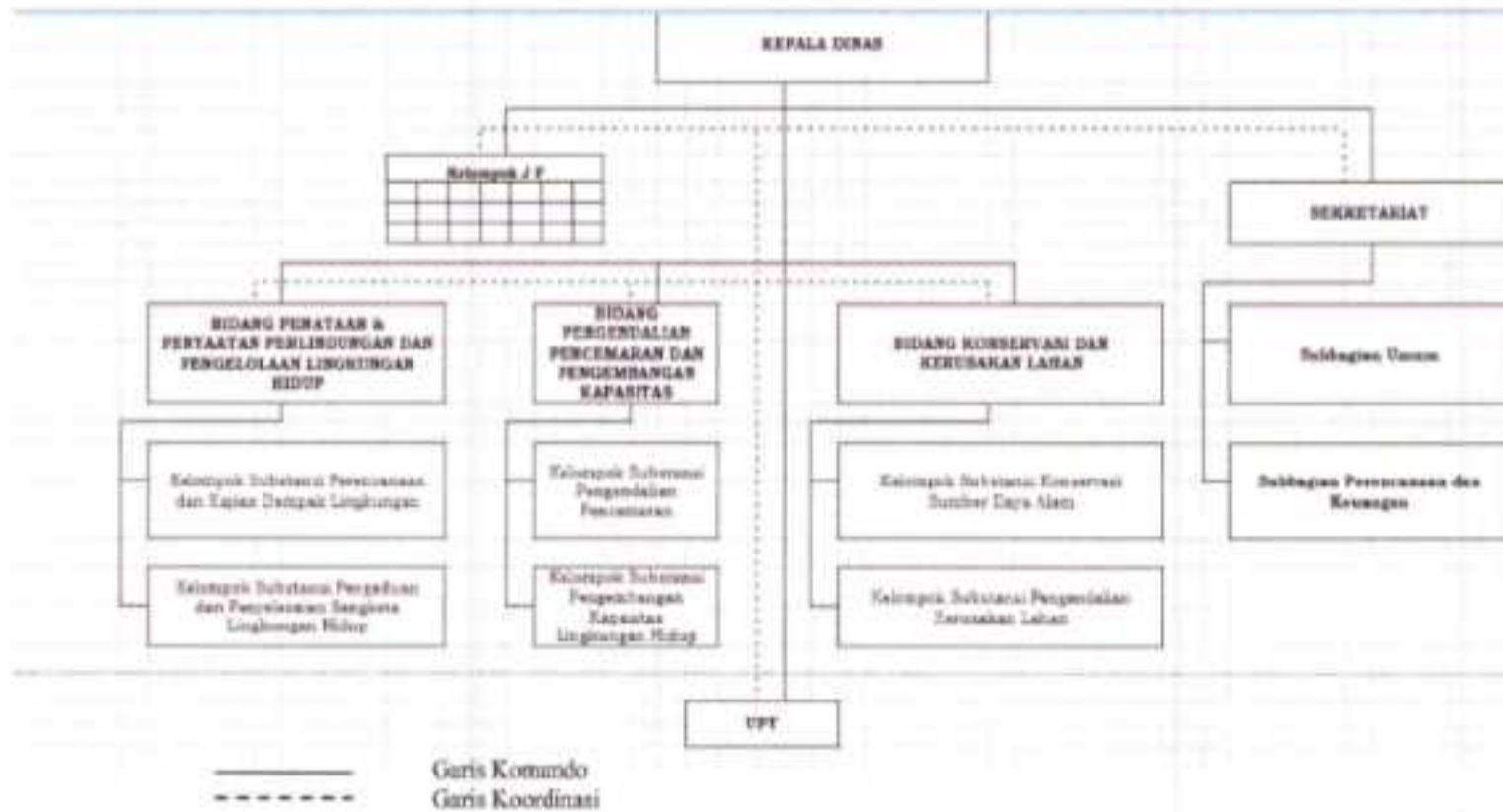
Gambar 1. 1 Cascading Kinerja Sebagai Dasar Pembentukan Perangkat Daerah





C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi





Gambar 1. 2 Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

D. Tugas dan Fungsi

Dinas Lingkungan Hidup dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2025 Adapun Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup. Adapun Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah.

1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 43 tahun 2023, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas untuk membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan umum di bidang lingkungan hidup
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup
- c. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang lingkungan hidup
- d. Pengelolaan system informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup



- e. Penataan dan pentaatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- f. Pengendalian pencemaran dan pengembangan kapasitas lingkungan hidup
- g. Konservasi dan pengendalian kerusakan lahan
- h. Pemberdayaan masyarakat di bidang lingkungan hidup
- i. Pengkoordinasian reformasi birokrasi, system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Dinas
- j. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang lingkungan hidup
- k. Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang lingkungan hidup
- l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang lingkungan hidup
- m. Pengelolaan UPT

E. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Diuraikan secara ringkas permasalahan utama yang sedang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya produksi sampah yang tidak diikuti dengan penambahan TPA baru
Meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Gunungkidul juga berdampak pada meningkatnya produksi sampah, dimana hal tersebut menimbulkan banyaknya sampah yang masuk ke TPA Wukirsari. Daya tampung TPA yang semakin menurun akan mengakibatkan berkurangnya kemampuan pengelolaan sampah sehingga kedepannya harus dicarikan solusi untuk mengatasi persampahan yang semakin meningkat. Selain itu, pembinaan terhadap masyarakat untuk menjalankan program 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) masih perlu dilakukan.
2. Tingginya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan
Alih fungsi lahan menjadi industri dan dunia usaha berdampak juga dengan meningkatnya potensi pencemaran dan kerusakan di bidang lingkungan hidup. Dampak positifnya memang meningkatnya perkembangan perekonomian daerah, namun perkembangan tersebut juga harus diikuti dengan manajemen pengelolaan lingkungan hidup



yang baik agar dampak pencemaran yang terjadi tidak berakibat pada turunnya kualitas lingkungan hidup

3. Sebagian masyarakat masih membuang limbah domestiknya ke sungai
4. Menurunnya kualitas air, dan udara
5. Meningkatnya alih fungsi lahan

Alih fungsi lahan menjadi lahan non pertanian yang terjadi sepanjang tahun 2025 memberikan dampak yang signifikan terhadap ekosistem dan kondisi lahan di wilayah Kabupaten Gunungkidul. Beberapa pelanggaran juga terjadi terhadap area hutan, sempadan sungai, dan sempadan pantai. Kondisi tersebut menyebabkan rusaknya ekosistem sungai, karst dan menurunnya luas ruang terbuka hijau.

F. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta anggaran pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi				Pegawai yang ada						Jenis Kelamin		
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi					L	P
1	2	3	4				5	6					7	8
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA	SMP-SD		
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	v	v			1		1				1	
B.	Jabatan Administrasi													
	1. Administrator	4	v	v			4	3	1				2	2
	2. Pengawas	6		v			6	1	4	1			3	3
	3. Pelaksana	265		v	v		168		10	6	104	48	153	15
C.	Jabatan Fungsional	74	v	v	v		6	3	3				2	4
	Jumlah	350					185	7	19	7	104	48	161	24

Sumber: Data Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Desember 2025

Berdasarkan data pada tabel, tingkat pendidikan SDM Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul relatif sedang dan lebih didominasi laki-laki dibanding perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan SMA sebanyak 104 orang (56,22%), disusul oleh jenjang



pendidikan SMP-SD sebanyak 48 orang (25,95%), S1 sebanyak 19 orang (10,27%), S2 sebanyak 7 orang (3,78%) dan D3 sebanyak 7 orang (3,78%).

Berdasarkan Jenis kelamin, jumlah pegawai laki-laki sebanyak 161 orang, lebih banyak dibanding jumlah pegawai perempuan yang hanya sebanyak 24 orang. Hal ini disebabkan karena pada posisi pelaksana jenis pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan fisik yang kebanyakan dilakukan oleh petugas laki-laki. Sedangkan pada posisi pejabat struktural maupun fungsional jumlah pegawai laki-laki dan perempuan terdapat keseimbangan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 165 orang, terdiri dari 97 orang pelaksana dan 68 jabatan fungsional. Terdapat unit kerja eselon IV yakni Subbagian Perencanaan dan Keuangan, subbagian umum, Kepala UPT Laboratorium, Kepala Subbagian TU UPT Lab, Kepala UPT KP dan Kepala Subbagian TU UPT KP.

Tabel 1. 2 Sarana-Prasarana

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)*
	Aset Tetap		
1	Alat-alat Angkutan	150 unit	7.004.723.397,33
2	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	541 unit	1.045.842.277,50
3	Alat-alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	20 unit	165.683.250,00
	Aset Tetap Lainnya		
1	Tanaman	3.063	1.090.494.400,00
	<i>Jumlah</i>		8.262.338.351,83

Sumber: Laporan Aset 31 Desember 2025

Kendaraan dinas terdiri dari 2 (dua) unit kendaraan dinas jabatan dan kendaraan operasional yang terdiri dari kendaraan roda dua, kendaraan roda tiga serta truck pengangkut sampah. Perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi aula, ruang arsip, dan mushola.



Tabel 1. 3 Anggaran Dinas Lingkungan Hidup 2025

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH			
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.010.180.900,00	1.068.232.100,00	58.051.200,00
4 1 02	Retribusi Daerah	1.010.180.900,00	1.068.232.100,00	58.051.200,00
	Jumlah Pendapatan	1.010.180.900,00	1.068.232.100,00	58.051.200,00
5	BELANJA DAERAH			
5 1	BELANJA OPERASI	12.783.807.758,00	12.411.256.144,28	(372.551.613,72)
5 1 01	Belanja Pegawai	2.942.497.624,00	2.960.772.018,00	18.274.394,00
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	9.550.810.134,00	9.159.984.126,28	(390.826.007,72)
5 1 05	Belanja Hibah	290.500.000,00	290.500.000,00	0,00
5 2	BELANJA MODAL	8.615.167.645,00	5.945.052.140,00	(2.670.115.505,00)
5 2 01	Belanja Modal Tanah	0	0,00	0,00
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	610.687.000,00	1.291.187.000,00	680.500.000,00
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.654.480.645,00	4.214.639.140,00	(3.439.841.505)
5 2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00
5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
5 2 06	Belanja Modal Lainnya	350.000.000,00	439.226.000,00	89.226.000,00
	Jumlah Belanja	21.398.975.403,00	18.356.308.284,28	(3.042.667.118,72)
	Total Surplus/(Defisit)	(20.388.794.503,00)	(17.288.076.184,28)	3.100.718.318,72
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0	0	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	0	
	Pembiayaan Neto	0	0	

Sumber: DPPA Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul berasal dari APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dan juga dukungan dari Dana Keistimewaan.. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2025 Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul semula Rp 21.398.975.403,00 dan mengalami perubahan menjadi Rp 18.356.308.284,28 atau berkurang Rp 3.042.667.118,72. Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp 58.051.200,00 dari Rp.1.010.180.900,00 menjadi Rp.1.068.232.100,00.



BAB II berisi:

- A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
- B. Strategi dan Arah Kebijakan
- C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025
- D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja OPD

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja daerah dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup sebagai dokumen teknis operasional.

A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Sesuai cascade kinerja, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah "Pembangunan Kawasan Terintegrasi dan Berkelanjutan" yang didukung oleh "Program Pembangunan Infrastruktur".

Adapun tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatnya tata kelola lingkungan hidup diukur dengan indikator nilai peningkatan tata kelola lingkungan hidup,
2. Meningkatnya perlindungan pengelolaan lingkungan hidup diukur dengan persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, ditetapkan sasaran strategis yaitu:

1. Terwujudnya Tata Kelola Lingkungan Hidup, diukur dengan indikator nilai peningkatan tata kelola lingkungan hidup.
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah
3. Terwujudnya Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diukur dengan indikator persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan.

Sasaran-sasaran strategis tersebut menggunakan indikator kinerja yang sama atau sepadan dengan indikator tujuan, sehingga pencapaiannya secara langsung mencerminkan keberhasilan tujuan Dinas



Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul selama periode Renstra 2021–2026. Dengan demikian, indikator nilai peningkatan tata kelola lingkungan hidup, serta persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai alat ukur kinerja sasaran strategis sekaligus indikator keberhasilan pencapaian tujuan Dinas Lingkungan Hidup selama periode Renstra 2021–2026

Selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul 2021-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2021	Target Tahunan					Target Akhir Renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	Terwujudnya Tata Kelola Lingkungan Hidup	Nilai Peningkatan tata kelola lingkungan hidup	Persen	NA	34,60	38,35	46,25	54,15	62,05	62,05
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai AKIP		74,53	80,05	80,07	80,09	80,11	80,13	80,13
3	Terwujudnya Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan	Persen	43	50	54	58	61	65	65

Sumber: Perubahan Renstra DLH

Pedoman teknis pengelolaan dan pengukuran kinerja tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 155/KPTS/2025 tentang Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah 2025. Adapun pedoman pengukuran terhadap Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:



Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan/Penjelasan/ Formulasi
1	Terwujudnya Tata Kelola Lingkungan Hidup	Nilai Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup	Σ [20%* Program Pengendalian Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup] + [30%* Program Pengelolaan Persampahan] + [10%* Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat] + [10%* Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat] + [15%* Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)] + [15%* Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang]
			Tipologi data: Non Kumulatif
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Indikator ini mengukur kualitas implementasi AKIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun n-1. Dasar Pengukuran adalah PermenpanRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Nilai AKIP PD merupakan hasil akhir penjumlahan nilai tertimbang dari komponen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan kinerja bobot 30%; 2. Pengukuran kinerja bobot 30%; 3. Pelaporan Kinerja bobot 15%; 4. Evaluasi kinerja internal bobot 25%.
3	Terwujudnya Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan	Rumus : Σ [(40%* Persentase Program perencanaan lingkungan hidup)+(30%* Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup)+(30%* Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan pengelolaan lingkungan hidup)] x 100%
			Tipologi data: Non Kumulatif

B. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Strategi dan Arah Kebijakan

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Terwujudnya Tata Kelola Lingkungan Hidup	Meningkatkan persentase pengendalian pencemaran	Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
		Meningkatkan persentase penanganan sampah	Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup



		Meningkatkan persentase lembaga/kelompok masyarakat yang peduli terhadap lingkungan	Meningkatkan jumlah kelompok masyarakat yang peduli lingkungan
		Meningkatkan persentase partisipasi masyarakat dalam lomba lingkungan hidup	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam lomba lingkungan hidup
		Perlindungan dan pemanfaatan keanekaragaman spesies, dan genetik secara lestari dan berkelanjutan	Peningkatan pengelolaan konservasi keanekaragaman hayati, spesies dan genetik
		Meningkatkan persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan tata ruang	Peningkatan penyelenggaraan keistimewaan tata ruang
2	Terwujudnya Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkatkan tata Kelola perijinan bidang lingkungan hidup yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima	Peningkatan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas kinerja pembinaan dan pengawasan ijin lingkungan

C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 4 Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Terwujudnya Tata Kelola Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	845.531.000,00	1.014.751.000,00	169.220.000
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	761.331.000,00	932.551.000,00	171.220.000,00
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	194.675.000,00	312.475.000,00	117.800.000,00
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	566.656.000,00	620.076.000,00	53.420.000,00
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan	84.200.000,00	82.200.000,00	(2.000.000,00)



Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	84.200.000,00	82.200.000,00	(2.000.000,00)
Program Pengelolaan Persampahan	6.117.850.041,00	6.260.162.369,00	142.312.328,00
Pengelolaan Sampah	6.067.850.041,00	6.210.162.369,00	142.312.328,00
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	280.655.000,00	270.655.000,00	(10.000.000,00)
Penanganan Sampah melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Kabupaten /Kota atau TPA/TPST Regional	5.787.195.041,00	5.939.507.369,00	152.312.328,00
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	50.000.000,00	50.000.000,00	0
Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	50.000.000,00	50.000.000,00	0
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	177.145.000,00	192.760.000,00	15.615.000,00
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	177.145.000,00	192.760.000,00	15.615.000,00
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	49.925.000,00	38.410.000,00	(11.515.000,00)
Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	19.100.000,00	16.520.000,00	(2.580.000,00)
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Pendidikan Formal/Lembaga Masyarakat/Komunitas/Kelompok Masyarakat	108.120.000,00	137.830.000,00	29.710.000,00
Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	145.160.000,00	87.195.000,00	(57.965.000,00)
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	145.160.000,00	87.195.000,00	(57.965.000,00)
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	145.160.000,00	87.195.000,00	(57.965.000,00)
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	3.536.199.645,00	2.702.399.817,00	(833.799.828,00)
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	3.536.199.645,00	2.702.399.817,00	(833.799.828,00)
Pengelolaan Kebun Raya	17.096.000,00	0,00	(17.096.000,00)



	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	3.389.423.645,00	2.578.179.817,00	(811.243.828,00)
	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	24.030.000,00	21.920.000,00	(2.110.000,00)
	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	105.650.000,00	102.300.000,00	(3.350.000,00)
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	6.525.073.000,00	4.133.523.824,00	(2.391.549.176,00)
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	6.525.073.000,00	4.133.523.824,00	(2.391.549.176,00)
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	6.525.073.000,00	4.133.523.824,00	(2.391.549.176,00)
Terwujudnya Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	44.395.000,00	38.075.000,00	(6.320.000,00)
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	44.395.000,00	38.075.000,00	(6.320.000,00)
	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	44.395.000,00	38.075.000,00	(6.320.000,00)
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	6.629.800,00	5.679.800,00	(950.000,00)
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	6.629.800,00	5.679.800,00	(950.000,00)
	Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	6.629.800,00	5.679.800,00	(950.000,00)
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	43.950.000,00	34.750.000,00	(9.200.000,00)
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	43.950.000,00	34.750.000,00	(9.200.000,00)
	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	43.950.000,00	34.750.000,00	(9.200.000,00)
	Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran	17.441.933.486	14.469.296.810,00	(2.972.636.676,00)

Sedangkan program penunjang atau pendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.



Tabel 2. 5 Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.957.041.917,00	3.887.011.474,28	(70.030.442,72)
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.865.000,00	58.985.000,00	(1.880.000,00)
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.996.665.337,00	3.002.081.702,00	5.416.365,00
4	Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah	193.171.680,00	188.431.680,00	(4.740.000,00)
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	316.436.500,00	234.287.500,00	(82.149.000,00)
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16.688.000,00	16.688.000,00	0
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	226.380.000,00	255.915.992,28	29.535.992,28
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	146.835.400,00	130.621.600,00	(16.213.800,00)
	Total Anggaran Pendukung	3.957.041.917,00	3.887.011.474,28	(70.030.442,72)

Sumber: DPPA DLH Tahun 2025

Tabel 2. 6 Indikator Kinerja Program

No	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Alasan/Penjelasan/ Formulasi
1.	Terwujudnya Tata Kelola Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pengendalian pencemaran	$\frac{\text{Persentase pencegahan potensi pencemar}}{\sum \text{potensi pencemar}}$
		Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah dikelola	$(50\% \times \text{penanganan sampah}) + (50\% \times \text{pengurangan sampah})$
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase lembaga/ kelompok masyarakat yang peduli terhadap Lingkungan Hidup	$\frac{\sum \text{yang menjalankan}}{\sum \text{yang disosialisasikan}} \times 100\%$
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Terlaksana dengan Baik	$\frac{\sum \text{Peserta Lomba}}{\sum \text{Peserta Lomba t-1}} \times 100\%$
		Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase RTH Publik dalam Kondisi Baik	$\frac{\text{luas RTH publik kondisi baik}}{\text{luas RTH publik}} \times 100\%$
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta	Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta	$\frac{\sum \text{kegiatan keistimewaan yang di tangani}}{\text{kegiatan keistimewaan}} \times 100\%$



No	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Alasan/Penjelasan/ Formulasi
		Urusan Tata Ruang	urusan tata ruang terlaksana dengan baik	target kegiatan keistimewaan yang di rencanakan
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten terlaksana dengan baik	$\frac{\sum \text{Realisasi Penunjang Urusan Pemerinta Daerah Kabupaten/Kota}}{\sum \text{Target Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota}} \times 100\%$
3	Terwujudnya Periindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase perencanaan lingkungan hidup terlaksana dengan baik	$\frac{\sum \text{dokumen perencanaan lingkungan hidup tersusun}}{\sum \text{kebutuhan dokumen lingkungan hidup}} \times 100\%$
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup berjalan dengan baik	$\frac{\sum \text{pengaduan tertangani}}{\sum \text{pengaduan}} \times 100\%$
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) terlaksana dengan baik	$\frac{\sum \text{pelaku usaha yg dibina atau diawasi}}{\sum \text{pelaku usaha yg berpotensi berdampak thd lingkungan}} \times 100\%$

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Berdasarkan capaian indikator kinerja pada tahun sebelumnya yang sudah melampaui target, maka pada tahun 2025 dilakukan perubahan proyeksi target indikator kinerja. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bupati Gunungkidul, sesuai proyeksi target baru adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 7 Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya tata kelola lingkungan hidup	Nilai Peningkatan tata Kelola lingkungan hidup	persen	80,83
2.	Meningkatnya pelindungan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan	persen	61,05



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Terwujudnya Tata Kelola Lingkungan Hidup	Nilai Peningkatan tata Kelola lingkungan hidup	persen	80,83
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	81,15
3.	Terwujudnya perlindungan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan	persen	61,05

Keterangan Tambahan:

- Indikator kinerja dan target kinerja berubah, tetapi volume anggaran berkurang sehubungan adanya refocusing kegiatan

Pada tahun 2025, Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Perubahan dilakukan karena adanya perubahan penetapan target kinerja, refocusing kegiatan dan realokasi anggaran serta telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya tata kelola lingkungan hidup	Nilai Peningkatan tata Kelola lingkungan hidup	persen	95,27
2.	Meningkatnya perlindungan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan	persen	58,55

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Terwujudnya Tata Kelola Lingkungan Hidup	Nilai Peningkatan tata Kelola lingkungan hidup	persen	95,27
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	82,82
3.	Terwujudnya perlindungan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan	persen	58,55

Pada Perubahan Perjanjian Kinerja 2025 dilakukan perubahan target capaian. Berdasarkan Dokumen Renstra, target Nilai AKIP tahun 2025 adalah sebesar 80,11 dimana jumlah tersebut masih di bawah realisasi 2024, sehingga pada target pada Perubahan Perjanjian Kinerja ditetapkan target Nilai AKIP PD 2025 menjadi 82,82



Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Rp 4.133.523.824,00	DAIS
2.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.887.011.474,28	APBD
3.	Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp 38.075.000,00	APBD
4.	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp 1.014.751.000,00	APBD
5.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp 2.702.399.817,00	APBD
6.	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp 34.750.000,00	APBD
7.	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp 192.760.000,00	APBD
8.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup	Rp 87.195.000,00	APBD
9.	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp 5.679.800,00	APBD
9.	Pengelolaan Persampahan	Rp 6.260.162.369,00	APBD
TOTAL		Rp 18.356.308.284,28	

Keterangan Tambahan:

Indikator kinerja dan target kinerja berubah, tetapi volume anggaran berkurang sehubungan adanya refocusing kegiatan

E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

1. Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah aplikasi *e-SAKIP* (e-gov.gunungkidulkab.go.id)



<http://e-gov.gunungkidulkab.go.id/>

Sumber:

Gambar 2.1 E-SAKIP



2. Sistem Informasi Pengendalian Pelaporan dan Inovasi Daerah (SIPANDA)



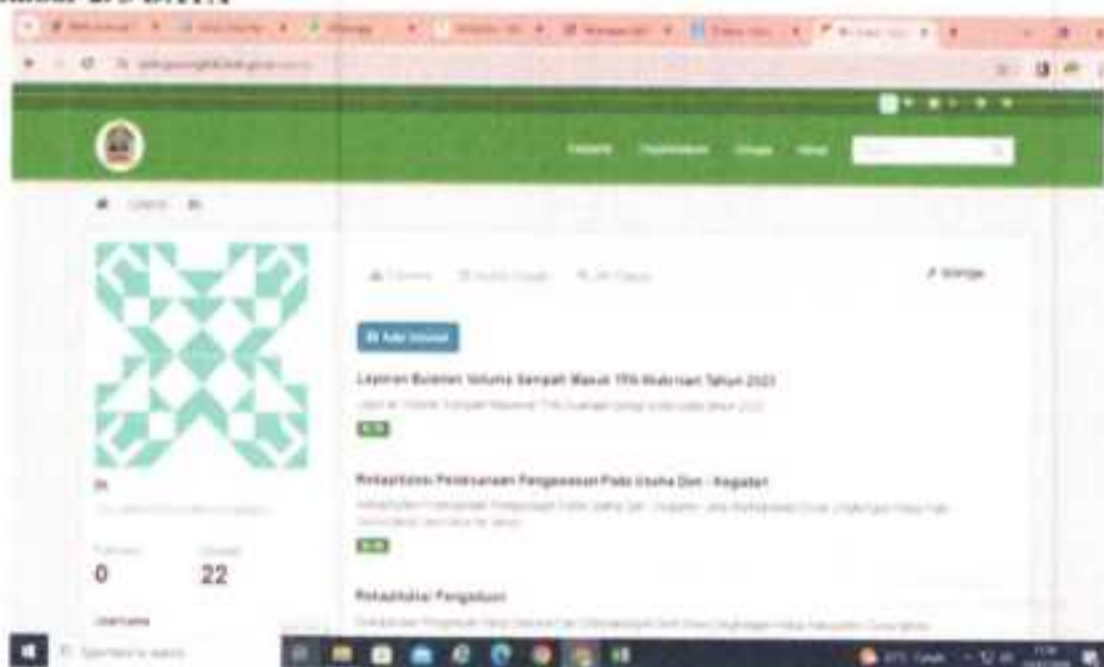
Gambar 2. 2 SIPANDA

Sumber : <https://sipanda.gunungkidulkab.go.id>

3. Data

Adalah aplikasi yang digunakan untuk pemenuhan PPID. Dapat digunakan secara umum oleh masyarakat yang ingin mendapatkan data sehingga masyarakat tidak perlu datang ke Dinas untuk memperoleh informasi.

Gambar 2. 3 DATA



Sumber: <https://data.gunungkidulkab.go.id/>



4. E-plan

Gambar 2. 4 E-Planning



Sumber: <https://eplan-ng.gurungkidulkab.go.id/>

5. Lpse

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah (K/L/PD) yang tidak memiliki LPSE dapat menggunakan fasilitas LPSE yang terdekat dengan tempat kedudukannya untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. Selain memfasilitasi UKPBJ dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik, LPSE juga melayani pendaftaran Pelaku Usaha baru yang berdomisili di wilayah kerja LPSE yang bersangkutan.

Gambar 2. 5 LPSE



Sumber : <https://lpse.gurungkidulkab.go.id>



6. SiRUP

SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (Web based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP.

Gambar 2. 6 SiRUP

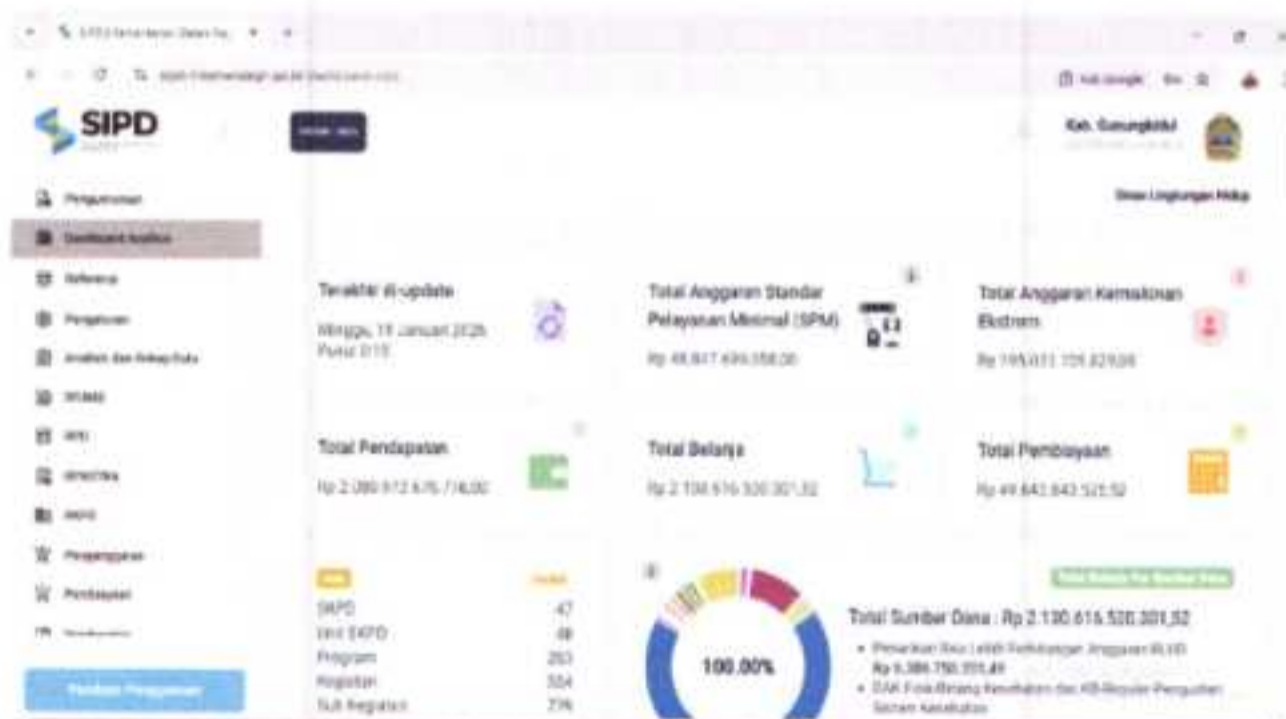


Sumber : <https://sirup.lkpp.go.id>

7. Aplikasi SIPD

Sistem Informasi Pembangunan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan Profil Pembangunan Daerah.

Gambar 2. 7 SIPD-RI

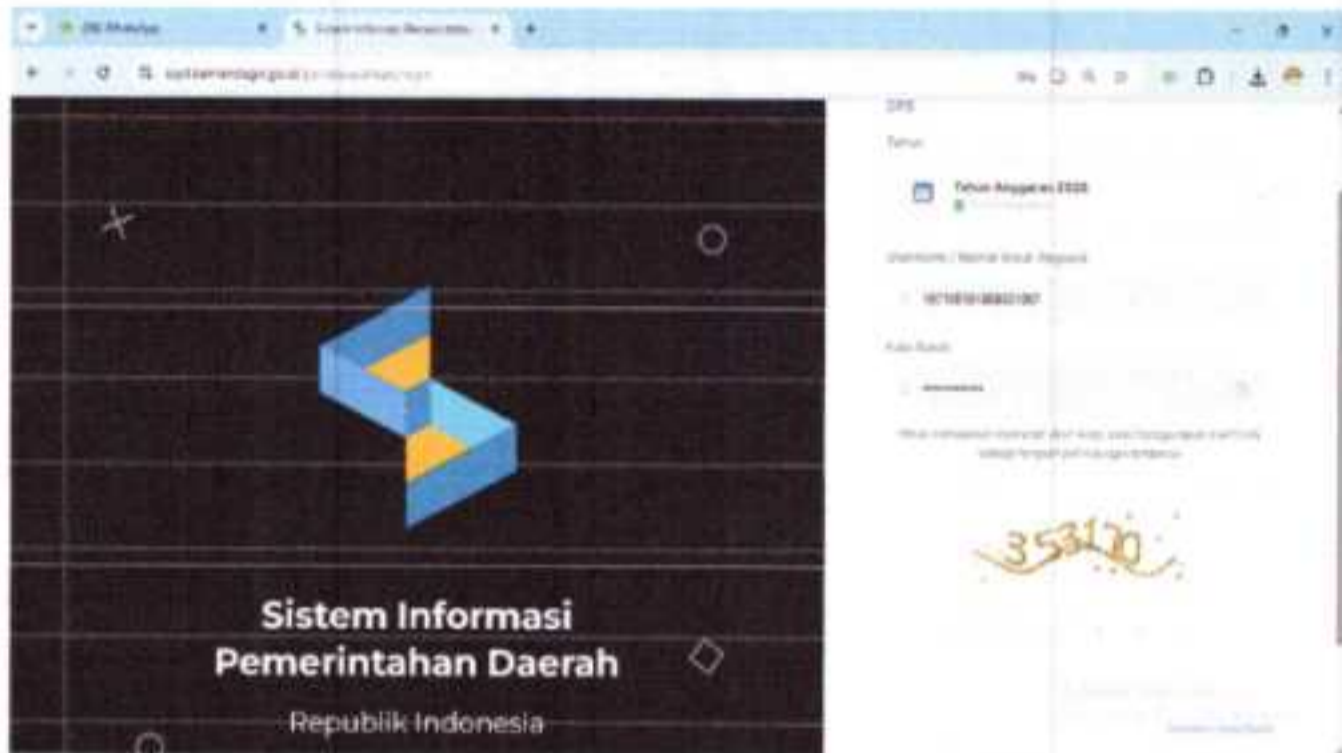


Sumber : <https://sipd-ri.kemendagri.go.id/dashboard-sipd>



8. Aplikasi SIPD Penatausahaan

Gambar 2.8



Sumber: <https://sipd.kemendagri.go.id/penatausahaan/login>

9. Aplikasi DATAKU

Gambar 2.9 DATAKU

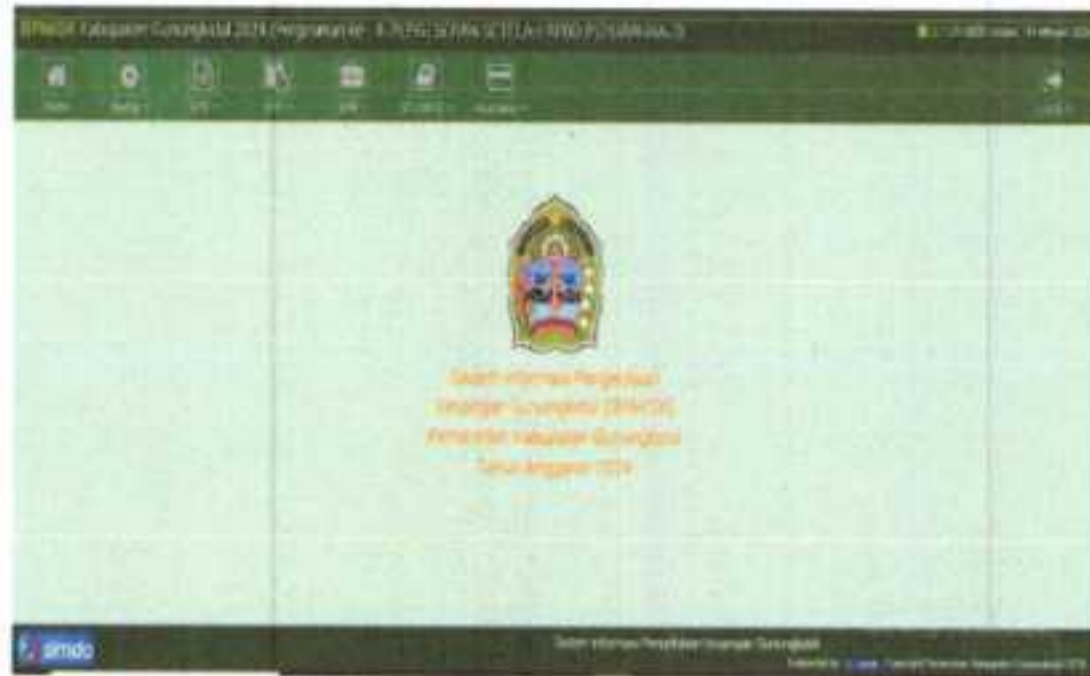


Sumber : <https://bappeda.jociaprov.go.id/dataku/site>



10. SIPAKGK (SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN GUNUNGKIDUL)

Gambar 2. 10 SIPAKGK



Sumber : <https://sipakgk.gunungkidulkab.go.id/sipkdf/>

11. SIM Aset

Gambar 2.12. SIM Aset



Sumber : <https://aset.gunungkidulkab.go.id/2025/auth/login>

Sistem Informasi Manajemen Aset merupakan aplikasi yang dipakai untuk mengelola aset yang ada di Dinas Lingkungan Hidup.



12. Instagram, website dan youtube Dinas Lingkungan Hidup

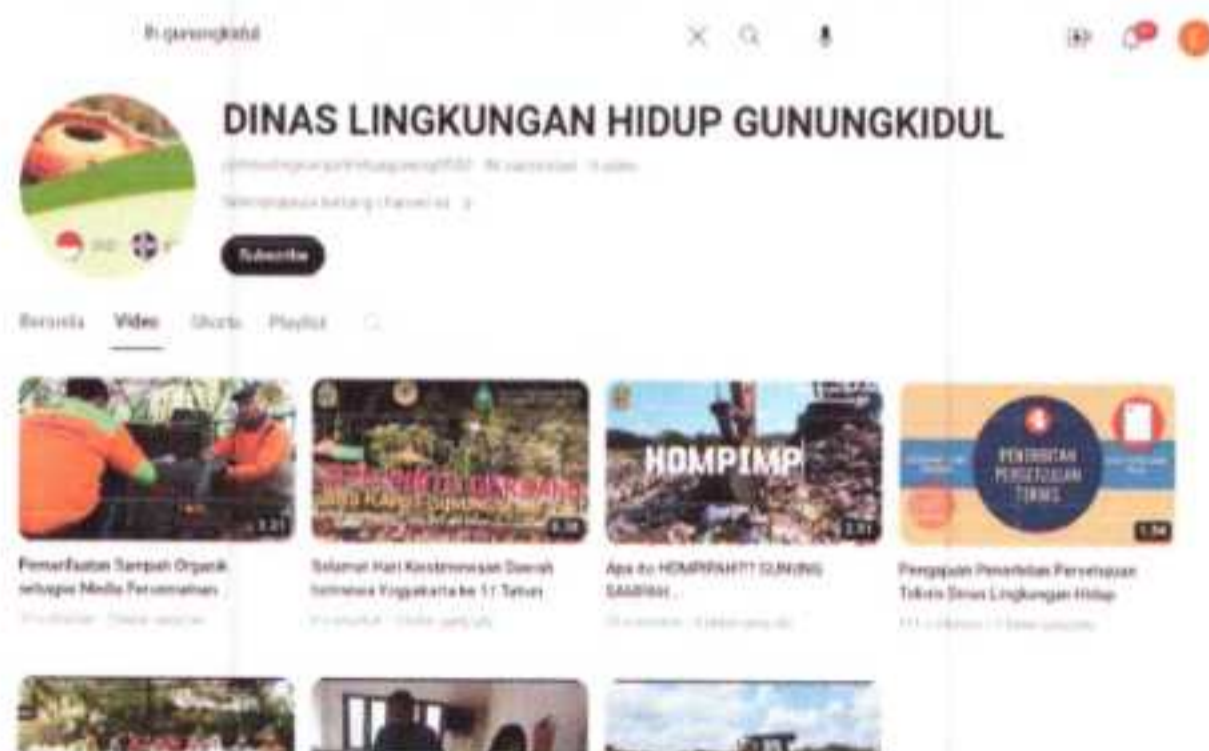
Gambar 2. 12 Instagram, website, dan youtube Dinas Lingkungan Hidup



Sumber : https://www.instagram.com/fh_gunungkidul/



Sumber: <https://fh.gunungkidulkab.go.id/>



Sumber: <https://www.youtube.com/@dinaslingkunganhidupgunung9550>



BAB III berisi:

- A. Capaian Kinerja Tahun 2025
- B. Capaian Kinerja Lainnya
- C. Realisasi Anggaran

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2025

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul dengan Bupati Gunungkidul tahun 2025. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 ≤ 100	Sangat Tinggi	Hijau Tua
2.	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3.	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4.	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2021	CAPAIAN 2024	TAHUN 2025			KRITERIA / KODE	TARGET AKHIR RPJMD
						TARGET	REALISASI	PERSENTASE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Terwujudnya tata kelola lingkungan hidup	Nilai Peningkatan tata Kelola lingkungan hidup	Persen	n/a	95,26	95,27	95,37	100,10	Sangat Tinggi	62,05
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP PD		74,53	82,32	82,82	82,32	99,40	Sangat Tinggi	80,13
	Terwujudnya perlindungan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan	Persen	43	58,32	58,55	73,61	125,72	Sangat Tinggi	65,00



Analisis capaian kinerja tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul dianalisis secara terpadu karena menggunakan indikator kinerja yang sama atau sepadan. Kesamaan indikator tersebut menunjukkan adanya keterkaitan langsung antara tujuan dan sasaran, sehingga capaian sasaran strategis secara langsung merefleksikan tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan 1 Meningkatnya Tata Kelola Lingkungan Hidup

Tujuan Dinas Lingkungan Hidup yang pertama diukur dengan indikator kinerja Nilai Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup. Pencapaian tujuan ini didukung dengan 2 sasaran yaitu Terwujudnya Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. Pengukuran tujuan dan sasaran Terwujudnya Tata Kelola Lingkungan Hidup menggunakan indikator kinerja yang sama sehingga capaian tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul dianalisis secara terpadu dengan capaian sasaran strategis secara langsung mencerminkan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan.

Sasaran 1: Terwujudnya Tata Kelola Lingkungan Hidup

Kinerja sasaran Terwujudnya Tata Kelola Lingkungan Hidup diukur dengan indikator Nilai Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Terwujudnya Tata Kelola Lingkungan Hidup	Nilai Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup	$\Sigma [20\% \cdot \text{Program Pengendalian Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup}] + [30\% \cdot \text{Program Pengelolaan Persampahan}] + [10\% \cdot \text{Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat}] + [10\% \cdot \text{Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat}] + [15\% \cdot \text{Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)}] + [15\% \cdot \text{Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta urusan Tata Ruang}]$
			Tipologi data: Non Kumulatif



Capaian pada sasaran ini digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.4 Capaian Sasaran Terwujudnya Tata Kelola Lingkungan Hidup

Sasaran	Indikator Kinerja	TAHUN 2025			Kategori
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Terwujudnya Tata Kelola Lingkungan Hidup	Nilai Peningkatan tata Kelola lingkungan hidup	95,27	95,37	100,10	Sangat Tinggi

Dari data tersebut diatas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar 100,10%, termasuk dalam kategori sangat tinggi dengan realisasi 95,37% dan melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 95,27

Realisasi kinerja sebesar 95,37 pada tahun 2025 mengalami kenaikan jika dibandingkan pada tahun 2024. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 sampai dengan 2023, dan dibandingkan dengan target akhir Renstra di tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 5 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021-2025 serta perbandingan dengan target akhir Renstra di tahun 2026

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja					Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
		2021	2022	2023	2024	2025		
Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup	Nilai Peningkatan tata Kelola lingkungan hidup	n/a	74,88%	80,61	95,26	95,37	62,05	153,70

Dari evaluasi data tersebut diatas terlihat bahwa realisasi kinerja mengalami penurunan dibanding tahun 2024. Pencapaian target sasaran Nilai Peningkatan tata Kelola Lingkungan Hidup didukung oleh program sebagai berikut:

1. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
2. Program Pengelolaan Persampahan
3. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
4. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
5. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
6. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang



Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 6 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Meta Indikator
1.	Terwujudnya Tata Kelola Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pengendalian pencemaran	$\frac{\text{Persentase pencegahan potensi pencemar}}{\sum \text{potensi pencemar}}$
		Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah dikelola	$(50\% \times \text{penanganan sampah}) + (50\% \times \text{pengurangan sampah})$
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase lembaga/ kelompok masyarakat yang peduli terhadap Lingkungan Hidup	$\frac{\sum \text{yang menjalankan}}{\sum \text{yang disosialisasikan}} \times 100\%$
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Terlaksana dengan Baik	$\frac{\sum \text{Peserta Lomba}}{\sum \text{Peserta Lomba t-1}} \times 100\%$
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase RTH Publik dalam Kondisi Baik	$\frac{\text{luas RTH publik kondisi baik}}{\text{luas RTH publik}} \times 100\%$
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan tata ruang terlaksana dengan baik	$\frac{\sum \text{kegiatan keistimewaan yang di tangani}}{\text{target kegiatan keistimewaan yang di rencanakan}} \times 100\%$

Capaian kinerja program tersaji dalam tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%) Kategori
1	Nilai Peningkatan tata Kelola lingkungan hidup	80,61	1. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pengendalian pencemaran	65	100	153,85 Sangat Tinggi
			2. Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah dikelola	29	39,70	136,90 Sangat Tinggi
			3. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase lembaga/ kelompok masyarakat yang peduli terhadap Lingkungan Hidup	72	253,70	352,36 Sangat Tinggi
			4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase RTH Publik dalam Kondisi Baik	56	99,95	178,49 Sangat Tinggi



		5. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan tata ruang terlaksana dengan baik	75	100	133,33 Sangat Tinggi
		6. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam lomba Lingkungan Hidup	56	80,95	144,55 Sangat Rendah
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM				58,83	112,38	191,03 Sangat Tinggi

Capaian kinerja program pada Sasaran Nilai Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup rata-rata 191,03 termasuk kategori sangat tinggi, tetapi mengalami penurunan dibanding dengan tahun 2024.

Keberhasilan capaian indikator program pada sasaran Nilai Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup didukung dari:

1. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Persentase pengendalian pencemaran	100%
Indikator:	
pencegahan potensi pencemar dibagi dengan jumlah potensi pencemar	81
	81

Berikut data sumber potensi pencemar di lingkungan Kabupaten Gunungkidul:

Tabel 3.7 Data Perusahaan Pengguna SIMPEL 2025

NO	NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR INDUSTRI
1	AMARTA ASTA MULIA	Aktivitas Klinik Swasta
2	LINA KURNIA HUSADA	Aktivitas Klinik Swasta
3	PT Rejeki Sukses Santoso Pribadi - Mataram Sekti Wonosari	Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih
4	ANINDYA MITRA INTERNASIONAL	Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Alam
5	SAS HANDAYANI ABADI	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Kulit
6	KUSUMA ARGA MUKTI	Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Alam
7	UPT PUSKESMAS PONJONG I GUNUNGKIDUL	Aktivitas Puskesmas
8	Komitrandu Wonosari	Industri Penyamakan Kulit
9	AMANAH HUSADA PRIMA	Aktivitas Klinik Swasta
10	PELITA HUSADA	Aktivitas Rumah Sakit Swasta
11	Universitas Negeri Yogyakarta	Pendidikan Tinggi Program Akademik Pemerintah
12	Klinik Bintang Medika	Aktivitas Klinik Swasta
13	UPT PUSKESMAS PONJONG II	Aktivitas Puskesmas
14	Omah Srikandi Dental Care	Aktivitas Praktik Dokter Gigi
15	PT Janu Putra Sejahtera	Pembibitan Ayam Ras



NO	NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR INDUSTRI
16	Rumah Sakit Bethesda Wonosari	Aktivitas Rumah Sakit Swasta
17	Rumah Sakit Islam Gunungkidul	Aktivitas Rumah Sakit Swasta
18	Balai Taman Hutan Raya Bunder	Kelompok ini mencakup kegiatan kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami,
19	PT Estetika Medika Utama - Klinik Pratama Rawat Jalan LBC Cabang Wonosari	Aktivitas Klinik Swasta
20	PT Astra Internasional Tbk - SO Wonosari	Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor
21	puskesmas ngawen 1	Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan
22	PUSKESMAS KARANGMOJO II	Aktivitas Puskesmas
23	PT. CHAROEN POKPHAND JAYA FARM - HATCHERY WONOSARI - GUNUNG KIDUL	Pembibitan Ayam Ras
24	watu paris jogja	Hotel Melati
25	Puskesmas Tanjungsari	Aktivitas Puskesmas
26	DPP Nur Laelatul F	Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan
27	UPT PUSKESMAS NGLIPAR II	Aktivitas Puskesmas
28	UPT Puskesmas Playen I	Aktivitas Puskesmas
29	UPT Puskesmas Tepus II	Aktivitas Puskesmas
30	UPT Puskesmas Saptosari	Aktivitas Puskesmas
31	UPT PUSKESMAS WONOSARI I	Aktivitas Puskesmas
32	UPT Puskesmas Panggang II	Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan
33	Puskesmas Gedangsari I	Aktivitas Puskesmas
34	UPT Puskesmas Playen II	Aktivitas Puskesmas
35	UPT Puskesmas Karangmojo I	Aktivitas Puskesmas
36	UPT Puskesmas Paliyan	Aktivitas Puskesmas
37	UPT Puskesmas Ngawen II	Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan
38	UPT PUSKESMAS NGLIPAR 1	Aktivitas Puskesmas
39	LABORATORIUM DEVARA HOLISTIC AND DIAGNOSTIC CENTER	Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan
40	UPT Puskesmas Semin 2	Aktivitas Puskesmas
41	RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK ALLAUDYA	Aktivitas Rumah Sakit Swasta
42	UPT PUSKESMAS PATUK I	Aktivitas Puskesmas
43	UPT Puskesmas Tepus 1	Aktivitas Puskesmas
44	UPT Puskesmas Panggang I	Aktivitas Puskesmas
45	Klinik Pratama Rawat Inap Mitra Sejahtera	Aktivitas Klinik Swasta
46	UPT PUSKESMAS SEMANU II	Aktivitas Puskesmas
47	UPT Puskesmas Patuk II	Aktivitas Puskesmas
48	Klinik Pratama Rawat Inap As Salaam	Aktivitas Klinik Swasta
49	Praktek Mandiri Bidan Yustina Sri Widati	Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan



NO	NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR INDUSTRI
50	UPT Puskesmas Semanu I	Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan
51	UPT Puskesmas Semin 1	Aktivitas Puskesmas
52	Klinik Pratama Rawat Inap Wahyu Husada	Aktivitas Klinik Swasta
53	KLINIK PRATAMA RAWAT INAP MULTAZAM	Aktivitas Klinik Swasta
54	UPT Laboratorium Kesehatan Kabupaten Gunungkidul	Aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi
55	Klinik Utama Rawat Inap PDHI	Aktivitas Klinik Swasta
56	PT Ndalem Tentrem	Hotel Bintang
57	Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul	Kegiatan Administrasi Pemerintahan Lainnya
58	PT. Charoen Pokphand Jaya Farm Hatchery Wonosari - Gunung Kidul	Pembibitan Ayam Ras
59	PT Anugerah Heha Jaya	Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan daya tarik wisata buatan/binaan manusia yang belum dicakup pada kelompok 93231 s.d. 93233. Termasuk wisata outbond.
60	UPT Puskesmas Purwosari - Gunung Kidul	Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan
61	UPT Puskesmas Wonosari II Gunungkidul	Aktivitas Puskesmas
62	PT Sugih Alamanugroho	Penggalian Batu Kapur/Gamping
63	PT. Supersonic Chemical Industry	Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya
64	PT GARUDA PARANG SAMUDRA	Hotel Bintang
65	UPT Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul	Jasa Pengujian Laboratorium
66	Klinik Pratama Rawat Inap Cipta Husada	Aktivitas Klinik Swasta
67	PT Varadiva Jaya Abadi (Apotek K24 Jeruksari)	Industri Farmasi Dan Produk Obat Kimia
68	PT Widodo Makmur Unggas	Pembibitan Ayam Ras
69	Rumah Sakit Umum Daerah Saptosari	Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah
70	PT Komitrando Emporio	Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Pribadi
71	PT Leonisa Citra Medika / Klinik Utama Leonisa	Aktivitas Rumah Sakit Swasta
72	CV Sidorahayu Farm	Budidaya Ayam Ras Petelur
73	PT Woneei Midas Leathers	Perdagangan Eceran Pakaian
74	PT Malindo Feedmill Tbk	Pembibitan Ayam Ras
75	PT. PLN (Persero) ULP WONOSARI	Distribusi Tenaga Listrik
76	Rumah Sakit Nur Rohmah	Aktivitas Rumah Sakit Swasta
77	UPT Puskesmas Gedangsari II	Aktivitas Puskesmas
78	Rumah Sakit Umum Pelita Husada	Aktivitas Rumah Sakit Swasta
79	Rumah Sakit Pantj Rahayu	Aktivitas Rumah Sakit Swasta



NO	NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR INDUSTRI
80	Rumah Sakit Pembina Kesejahteraan Umat Muhammadiyah Wonosari	Aktivitas Rumah Sakit Swasta
81	Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari	Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah

Dokumentasi Kegiatan Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup :

1. Sampling Udara menggunakan metode Passive Sampler



Kantor Bappeda Kabupaten Gunungkidul



Jln. Pramuka, Wonosari, Gunungkidul

2. Sampling Air Limbah





3. Sampling Air Sungai



4. Sampling Air Laut



5. Uji Emisi Kendaraan Bermotor





6. Kegiatan Jum'at Bersih



Gambar 3. 1 Kegiatan Program Pengendalian Pencemaran

2. Program Pengelolaan Persampahan

Neraca Pengelolaan Sampah Tahun 2024-2025

Kabupaten Gunungkidul

Tabel 3. 8 Neraca Sampah SIPSN 2025

KETERANGAN	Tahun 2024	Tahun 2025	PERUBAHAN	
	Ton/tahun	Ton/tahun	Tahun 2025 - Tahun 2024	
			Ton/tahun	persen (%)
I JUMLAH TIMBULAN SAMPAH	134,318.32	134,529.18	210.86	0.16
(Jumlah Penduduk x Faktor Estimasi Timbulan Perkapita)				
II JUMLAH PENGURANGAN SAMPAH	32,614.76	244.82	-32.369,94	-99.25
Persentase pengurangan sampah	24.28	0.18		
a Jumlah Pembatasan Timbulan Sampah	850.01	642.51	-207.50	-24.41
b Jumlah Pemanfaatan Kembali Sampah	168.59	106.74	-61.85	-36.69
c Jumlah Pendaauran Ulang Sampah	31,596.16	138.08	-31,458.08	-99.56
III JUMLAH PENANGANAN SAMPAH	21,068.16	53,161.25	32,093.09	152.33
Persentase penanganan sampah	15.69	39.52	23.83	
d Pemilahan/Pengumpulan				



e	Pengangkutan*)				
	Sampah diangkut ke tempat pengolahan sampah (residu pemilahan)				
	Sampah diangkut ke tempat pemrosesan akhir (residu pengolahan)				
f	Pengolahan	153.66	31,881.75	31,728.09	
	Jumlah Sampah terolah menjadi bahan baku(pakan ternak, kompos, daur ulang dan upcycle)	153.66	31,881.75	31,728.09	
	Jumlah Sampah termanfaatkan menjadi sumber energi	0.00	0.00	0.00	-
g	Pemrosesan akhir	20,914.50	21,279.50	365	1.75
	Jumlah Sampah yang terproses di tempat pemrosesanakhir	20,914.50	21,279.50	271.92	1.75
IV	SAMPAH YANG DIKELOLA (II + III)	53,682.92	53,406.07	-276.85	-0.52
	Persentase sampah terkelola	39.97	39.70		
V	SAMPAH TIDAK DIKELOLA (I - IV)	80,635.40	81,123.11	487.71	0.60
	Persentase sampah tidak terkelola	60.03	60.30		

Jumlah % sampah terkelola dilihat dari tabel laporan SIPSAN (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional) adalah 39,70%. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dibanding data tahun.

Berdasarkan arahan Menteri Lingkungan Hidup, pada tahun 2025 terdapat perubahan dalam penginputan di aplikasi SIPSAN yaitu:

- Data pengurangan sampah yang diinput adalah sampah yang dikelola rumah tangga
- Data penanganan sampah yang diinput adalah sampah yang dikelola dan diolah di luar rumah tangga atau sudah masuk ke dalam pengelolaan fasilitas MRF (*Material Recovery Facilities*) seperti bank sampah, TPS3R, pusat daur ulang, pusat olah organik, TPST, sektor informasi dan TPA.



Sehingga, seperti terlihat pada tabel neraca sampah di atas, data pengurangan sampah tahun 2025 lebih sedikit dibanding tahun 2024 dan data penanganan sampah mengalami kenaikan sangat besar dibanding tahun 2024.

Dokumentasi kegiatan pengelolaan persampahan seperti terlihat pada gambar berikut:

1. Pengurangan Sampah di TPA Wukirsari Baleharjo



2. Pengangkutan Sampah



Pengangkutan Rutin Sampah Pantai



Pengangkutan Sampah di TPS Pasar Argosari

3. Gerak Kebersihan Pasca *Event*



Gambar 3. 2 Kegiatan Program Pengelolaan Sampah



3. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase lembaga/ kelompok masyarakat yang peduli terhadap Lingkungan Hidup	$\frac{\sum \text{yang menjalankan}}{\sum \text{yang disosialisasikan}} \times 100\%$
Persentase lembaga/ kelompok masyarakat yang peduli terhadap Lingkungan Hidup		253,70%
Indikator:		
jumlah yang menjalankan dibagi dengan		137
jumlah yang disosialisasikan		54

Sosialisasi selama tahun 2025:

No	Acara	Tanggal	Lokasi
1	Sosialisasi Satgas Siaga Sampah untuk ORMAS	11/02/2025	DLH Gunungkidul
2	Sosialisasi Pengelolaan Sampah dengan Ember Tumpuk	12/03/2025	Balai Dusun Selang IV
3	Sosialisasi Pengelolaan Sampah dengan Ember Tumpuk	13/03/2025	Balai Dusun Selang IV
4	Sosialisasi Pengelolaan Sampah dengan Ember Tumpuk	14/03/2025	Balai Dusun Selang IV
5	Sosialisasi satgas siaga sampah	17/03/2025	DLH Gunungkidul
6	Sosialisasi Satgas Sampah Tahap II (Pembentukan Bank Sampah OPD/Kapanewon)	17/04/2025	DLH Gunungkidul
7	Sosialisasi Pengelolaan Sampah Organik dengan Ember Tumpuk	21/04/2025	Balai Kalurahan Tileng
8	Sosialisasi Pengelolaan Sampah Organik dengan Ember Tumpuk	21/04/2025	Balai Padukuhan Banagung Tileng
9	Sosialisasi Pembentukan Bank Sampah Tk Kapanewon (Sos SATGAS Tahap II)	19/05/2025	DLH Gunungkidul
10	Sosialisasi Bank Sampah (Pelatihan Bank Sampah) I	28/07/2025	Kalurahan Sumberejo
11	sosialisasi SATGAS Siaga sampah TPS3R	8/05/2025	DLH Gunungkidul
12	Sosialisasi SATGAS SIAGA Sampah (monitoring evaluasi pengolahan sampah ember tumpuk)	19/08/2025	Balai Dusun Selang IV
13	Sosialisasi Pembentukan Bank Sampah Tahap I	8/09/2025	Balai Padukuhan Gubar, Giripurwo
14	Sosialisasi, Pertemuan JPSM dan Pemberian Penghargaan LH (Sosialisasi Keg. DPRD)	4/09/2025	DLH Gunungkidul



No	Acara	Tanggal	Lokasi
15	Sosialisasi pembentukan JPSM (Sosialisasi Keg. DPRD)	10/09/2025	Kapanewon Playen
16	Sosialisasi Peningkatan Kapasitas (Sosialisasi Keg. DPRD)	12/09/2025	Kapanewon Panggang
17	Sosialisasi Pembentukan Bank Sampah Tahap I	16/09/2025	Balai Padukuhan Wuni, Giricahyo
18	Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Satgas Siaga Sampah (Sosialisasi DPRD)	17/09/2025	Kapanewon Playen
19	Sosialisasi Pembentukan bank sampah Tahap II	19/09/2025	Balai Padukuhan Gubar, Giripurwo
20	Sosialisasi Aplikasi SIMPEL	25/02/2025	DLH Gunungkidul
21	Sosialisasi Aplikasi SIMPEL	22/05/2025	DLH Gunungkidul
22	Sosialisasi Pembentukan Bank Sampah	26/05/2025	Padukuhan Wuni, Giripurwo
23	Kegiatan Workshop Pembibitan tanaman lokal untuk sekolah peduli lingkungan	21/05/2025	Suaka Margasatwa Paliyan
24	Sosialisasi SATGAS SIAGA Sampah (monitoring evaluasi pengolahan sampah ember tumpuk)	19/08/2025	Padukuhan Selang IV
25	Sosialisasi Pembentukan Bank Sampah Tahap I	08/09/2025	Padukuhan Gubar
26	Sosialisasi, Pertemuan JPSM dan Pemberian Penghargaan LH (Sosialisasi Keg. DPRD)	04/09/2025	DLH Gunungkidul
27	Pelatihan Manajemen Bank sampah	11/09/2025	DLH Gunungkidul
28	Sosialisasi Peningkatan Kapasitas (Sosialisasi Keg. DPRD)	12/09/2025	Kapanewon Panggang
29	Sosialisasi Pembentukan Bank Sampah Tahap I	16/09/2025	Padukuhan Wuni, Giricahyo
30	Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Satgas Siaga Sampah (Sosialisasi DPRD)	17/09/2025	kapanewon Playen
31	Sosialisasi Pembentukan bank sampah Tahap II	19/09/2025	Padukuhan Gubar, Giripurwo , Purwosari
32	Sosialisasi Pembentukan Bank Sampah Tahap II	26/09/2025	Padukuhan Wuni Giricahyo
33	Sosialisasi Peningkatan Kapasitas dan Pertemuan JPSM Kapanewon Karangmojo (Sos. Kegiatan DPRD)	06/10/2025	Balai Kalurahan Bendungan
34	Sosialisasi Pembentukan Bank Sampah Tahap 1 di , Jurangjero	09/10/2025	Balai Padukuhan Jambu
35	Sosialisasi (DPRD) Peningkatan Kapasitas dan Pertemuan JPSM Kap. Nglipar	13/10/2025	Balai Kalurahan Natah



No	Acara	Tanggal	Lokasi
36	sosialisasi pemerhati kali (keg. DPRD)	20/10/2025	Balai Dusun Wiyoko Lor
37	sosialisasi (DPRD)Pengelolaan Sampah Organik dan Anorganik	27/10/2025	DLH Gunungkidul
38	Sos DPRD Pembentukan kelompok pemerhati kali	27/10/2025	Balai padukuhan Dengok Kidul, pacarejo, semanu
39	Sosialisasi Pembentukan Bank sampah Tahap 2	23/10/2025	balai kal Jambu
40	Sosialisasi BankSampah (Sos DPRD)	10/11/2025	Balai Kalurahan Pulutan
41	Kegiatan Sosialisasi Pengolahan Sampah Organik	13/11/2025	DLH Gunungkidul
42	Sosialisasi pengelolaan sampah (kegiatan DPRD)	08/12/2025	Universitas Gunungkidul
43	Sosialisasi Galon Tumpuk dalam acara Launching "Mas Gun Maos"	16/12/2025	Bangsas Sewoko Projo
44	Sosialisasi Proklim	17/02/2025	Watugajah
45	Sosialisasi Proklim	25/02/2025	Balai Padukuhan Genjahan
46	Sosialisasi Pantai Lestari	17/03/2025	Pantai Silli
47	Sosialisasi Pantai Lestari	19/03/2025	Pantai Nglambor
48	Pembinaan Ekowisata	06/05/2025	Nglanggeran
49	Pembinaan Ekowisata	23/05/2025	Pantai Drini
50	Sosialisasi Kehati	23/05/2025	Banjarejo
51	Sosialisasi Kehati	24/07/2025	Klepu
52	Pembinaan Pengembangan Taman Kehati Jurug	19/06/2025	Taman Kehati Donggolo Jurug Tepus
53	Pembinaan Pengembangan Taman Kehati Tlogo Sengon	19/06/2025	Taman Kehati Tlogo Sengon Tepus
54	Pembinaan Pengembangan Taman Kehati Wonosadi	28/07/2025	Taman Kehati Wonosari

Pihak yang menjalankan (Bank Sampah dan Adiwiyata)

Tabel 3.9 Data Bank Sampah dan Adiwiyata tahun 2025

NO	NAMA BANK SAMPAH	ALAMAT
1	Sampah Wasis	Dusun Tumpak RT19/03
2	Sumber Rejeki Plembon Lor	Plembon Lor Logandeng
3	Melati	Pager
4	Sumber Rejeki	Glidag
5	BS Punokawan	Logandeng
6	BS Nogosari 1	Logandeng
7	BS Jalakan	Logandeng
8	Nogosari 3	Bandung
9	Maheswari	Surya net Logandeng
10	Maju Lancar	Siono
11	Reva Laundry	Siono Kulon
12	Harapan Maju	Siyono kulon,Logandeng



NO	NAMA BANK SAMPAH	ALAMAT
13	Bangkit Penimbangan	Gading 9
14	Kalpataru	Banaran
15	Karang Resik	Banaran IV
16	Margo Lestari	Banaran 5
17	Margo Rukun	Banaran 8
18	Mekar Sari	Ngasem Utara
19	Mekar Asri	Gading 7
20	PKK Srikandi	Banaran 3
21	Playen 2 Asri	Playen 2
22	Barokah Toboyo	Dusun Toboyo Barat
23	Becik Resik	Dusun Gading 4, Gading
24	Bangkit Penimbangan	Dusun Gading 9, Gading
25	Mekar Asri	Dusun Gading 7, Gading
26	Mekar Sari	Dusun Ngasem Utara
27	Guyub Rukun	Dusun Plembutan Timur
28	Lestari	Wiyoko Selatan
29	Anggur Mas Mandiri	Kenteng RT 04/RW 12
30	Al Mutaqin	Hargo Mulyo
31	Asri	Tangkil 1
32	Pandan wangi	Pandan, sumberjo, semin
33	Berkah sampah tengaran	Tengaran, sumberjo, semin
34	Sumber makmur	Sambirobyong, sumberjo, semin
35	Sumber Rejeki	Tulung
36	Sumber Rejeki 2	Tulung
37	Swkar Mawar	kere
38	Sumber Rejeki	kembang
39	Adem ayam	Bendungan
40	Sido Makmur	Pabregan
41	Blimbing Lestari	Blimbing
42	Pantai Kukup	Kemadang
43	Pantai Baron	Kemadang
44	Menur	Keruk 3
45	Sartika	Jarah 2
46	Mandiri Sejahtera	Songbanyu I
47	Widoro Berkah	Widoro
48	Wuni	Wuni, Giricahyo
49	Gubar Makmur	Gubar, Giripurwo
50	Bersih Lestari	Duwet
51	Becik Resik	Karangtengah
52	Makmur Ngawi I	Ngawis Karangmojo
53	Mekar	Dadapayu Semanu
54	Guyub Rukun	Duwet Wonosari
55	Berkah	Dusun Nglebak
56	Migunani	Wareng
57	Berkah Sampah	Ngawu Pleyen
58	Bank Sampah Berkah	Dusun wareng 4



NO	NAMA BANK SAMPAH	ALAMAT
59	Berlian	Plembutan
60	Anugerah Sampah	Duwet
61	Sayang Sampah	Bandung
62	Saku Hijau	Ledoksari Kepek
63	Amanah	Bandung Playen
64	Kepuh Sari Nyawiji	Dusun Kepuhsari
65	Barokah Sampah	Plembutan
66	Resik Becik	Dusun Jetis Wetan
67	Mawar Sari	Dusun Karang Lor
68	Melati Bersih	Dusun Kepuh
69	Sumber Rejeki	Gading
70	Barokah	Dusun Jetis Kulon
71	Gudi Rejeki	Dusun Kedung
72	Guyup	Dusun Blimbing
73	Berkah Barokah	Dusun Serpeng Lor
74	karang Sari	Dusun Ngelak
75	Mekar Sari	Padukuhan Noogosari 2
76	Makmur	Dusun Dengok Kidul
77	Tengaran Asri	Tengaran
78	Maju Jaya	Dusun Karang Gemuk
79	Kuwon Kidul Mekar	Dusun Kuwon Kidul
80	Resik Bejik	Dusun Gedangan
81	Sejahtera	Dusun Ngaliyan Nglipar
82	Cemara	Dusun Kowon Tengah
83	Berkah Kedung I	Kedung 1, Karangtengah
84	Srikandi Wilayu	Dusun wilayu
85	Guyup Rukun	Dusun Wilayu
86	Ngurakapi	Dusun Duwet
87	Bersih hebat	Nogosari I
88	Sirtu	Dusun Siraman 1
89	Berkah Sari	Kepi Bandung
90	Berdikari Sejahtera	Dusun Jlantir 1
91	Sirda	Siraman 2
92	Wunung Bersih	Wunung
93	Getri	Dusun Gedangan 3
94	Srikandi mandiri klegung	Klegung
95	Maju Lancar	Dusun Pekel Rejo RT 6, 7, & 8
96	Kamalia Lestari	Kamal, wunung
97	Teguhan	Teguhan
98	Ngudi Rejeki	Dusun Tiogo wareng
99	Logandeng	Logandeng 1
100	Logandeng	Logandeng 2
101	Mekar Peduli	Dusun jalaan
102	Mandiri	Dusun Wareng 3 RT \$
103	Guyub Rukun	Ganang
104	Sam Jam Mas	Dusun Gatak



NO	NAMA BANK SAMPAH	ALAMAT
105	Jamber Asri	Dusun Jambe
106	Sumber Rezeki	Dusun Ngabdi Rejo
107	Barokah Taboyo	Dusun Toboyo Barat
108	Sekar jambu	Jambu
109	Lestari	Jonge Semanu
110	Barokah	Mijahan Semanu
111	Mekar Sari	Plembutan
112	Makmur Sejahtera	Pilangrejo Nglipar
113	Sejahtera	Banaran Playen
114	Rejeki Sampah	Gandu I Bendungan Karangmojo
115	Ngesti Lestari 2	Karang Wetan 2 Gedangrejo Karangmojo
116	Amrih Widodo	Selang Bendungan Karangmojo
117	Sekar Manunggal	Warung Gedangrejo Karangmojo
118	Sri Mulyo	Kernen Ngunut Playen
119	Sri Manunggal	Sriten Pilangrejo Nglipar
120	Gemahripah	Bendo Krambilsawit Saptosari
121	Ngudi Rejeki	Jarah 4 Banjarejo Tanjungsari
122	Sumber makmur	Ngleri Wetan Ngleri Playen
123	Makmur	Banaran 4 Banaran Playen
124	Maju Jaya	Dung Suru Pilangrejo
125	Hargo Makmur	Ngangkruk Pilangrejo Nglipar
126	Kali Gedhe Makmur	Kali gede Pilangrejo

No	Nama Sekolah	Keterangan
1	Sekolah Dasar (SD) Negeri Katongan III	Sekolah Adiwiyata Tk. Kabupaten
2	Sekolah Dasar (SD) Negeri Ngeposari II	Sekolah Adiwiyata Tk. Kabupaten
3	Sekolah Dasar (SD) Negeri Monggol I	Sekolah Adiwiyata Tk. Kabupaten
4	Sekolah Dasar (SD) Negeri Mulo Baru	Sekolah Adiwiyata Tk. Kabupaten
5	Madrasah Ibtidaiyah (MIN) Negeri 7 Gunungkidul	Sekolah Adiwiyata Tk. Kabupaten
6	Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Saptosari	Sekolah Adiwiyata Tk. Kabupaten
7	Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Gedangsari	Sekolah Adiwiyata Tk. Kabupaten
8	Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Panggang	Sekolah Adiwiyata Tk. Kabupaten
9	Madrasah Tsanawiyah 7 Gunungkidul	Sekolah Adiwiyata Tk. Kabupaten
10	Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Playen	Sekolah Adiwiyata Tk. Kabupaten
11	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Tepus	Sekolah Adiwiyata Tk. Kabupaten



Dokumentasi kegiatan Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat seperti terlihat pada gambar berikut:

1. Pembinaan Ekowisata



Pembinaan Ekowisata Drini



Pembinaan Ekowisata Nglanggeran

2. Pembinaan Proklim



Pembinaan Proklim Genjahan



Pembinaan Proklim Watu Gajah

3. Sosialisasi Pengelolaan Sampah





4. Penguatan JPSM



Gambar 3. 3 Kegiatan Program Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

4. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Presentase Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Teriaksana dengan Baik	$\frac{\sum \text{Peserta Lomba}}{\sum \text{Peserta Lomba t-1}} \times 100\%$
---	---	--

Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam lomba Lingkungan Hidup	80,95%
Indikator:	
Jumlah Peserta Lomba dibagi dengan	34
Jumlah Peserta Lomba t-1	42

Pada tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup tidak ada anggaran untuk Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, sehingga untuk jumlah peserta lomba t-1 memakai data tahun 2023.

Adapun rincian peserta lomba untuk tahun 2025 yaitu:

- Lomba Adiwiyata : 25 peserta
- Lomba TPS3R : 9 peserta
- Total : 34 peserta lomba

5. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase RTH Publik dalam Kondisi Baik	$\frac{\text{luas RTH publik kondisi baik}}{\text{luas RTH publik}} \times 100\%$
Persentase RTH Publik dalam Kondisi Baik	99,95%	
Indikator:		
luas RTH publik kondisi baik dibagi dengan	75226,38794	
luas RTH publik	75266,65191	



Luas RTH:

Tabel 3. 10 Luas RTH Kab Gunungkidul

No.	Jenis RTH	Luas (Ha)
1	Hutan Negara	13792,43924
2	Hutan Rakyat	59491,43772
3	Pekarangan (Perumahan/Perkantoran/Pertokoan)	61,827512
4	Pepohonan Lainnya yang Relevan	45,937717
5	Taman Lingkungan (Taman RT/RW/Kelurahan/Kecamatan)	5,273453
6	Media Jalan	0,140247
7	Sabuk Hijau	37,320217
8	Sempadan Pantai	2,943745
9	Sempadan Sungai	1109,915997
10	Taman Hutan Rakyat	670,333676
11	Taman Kota	16,171993
12	Taman Rekreasi	32,910388
Total RTH Publik Kabupaten/Kota 2024		75266,65191

Dari tabel luas RTH di atas, jenis RTH yang dikategorikan tidak baik adalah sabuk hijau dan sempadan pantai, dan sisanya masih dikategorikan dalam kondisi baik.

Dokumentasi kegiatan Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

1. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau



Monev Pembangunan Alun-Alun Wonosari



Monev Pembangunan Sumur Resapan di Terminal Semin



Pemangkasan Pohon di Jalan Kestrian Wonosari



Pemasangan Lampu di RTH Patuk



2. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya



Monev Taman Kehati Sengon



Pembinaan Pengembangan Taman Kehati

3. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan



Pemberian Bibit Tanaman Buah



Gambar 3.4 Dokumentasi Kegiatan Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

6. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan tata ruang terlaksana dengan baik	Σ kegiatan keistimewaan yang di tangani	$\times 100\%$
Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan tata ruang terlaksana dengan baik			100%
Indikator:			
jumlah kegiatan keistimewaan yang di tangani dibagi dengan			
target kegiatan keistimewaan yang di rencanakan			

Kegiatan yang direncanakan selama tahun 2025 di Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang meliputi :

- Pemberian stimulus monyet ekor panjang (MEP)
- Pembangunan Kandang Konservasi dan Elektrikal
- Pengawasan Pembangunan Kandang Konservasi dan Elektrikal



- Penyusunan DED Gedung Pengelola Teknik
- Penyusunan DED Kandang Aviary-1
- Penyusunan DED Mess Karyawan
- Pengadaan Kontainer Sampah

Dari semua kegiatan yang direncanakan tersebut semua dapat ditangani. Sehingga capaian kinerja untuk program ini Adalah 100%.

Dokumentasi Kegiatan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang



Rakor dan Monev Pembangunan Kandang Konservasi



Cek Patok Tanda Batas dan Pagar



Pemberian Stimulus Pakan (Pisang) untuk Monyet Ekor Panjang



Pemberian Stimulus Pakan (Ketela) untuk Monyet Ekor Panjang



Pemberian Bantuan Bibit dari BPDAS untuk Upaya Penanganan Monyet Ekor Panjang



Gambar 3.5 Dokumentasi Kegiatan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta



Faktor Penghambat Keberhasilan Sasaran

- a. Penggunaan data neraca sampah yang hanya sampai pada semester Satu
- b. Partisipasi masyarakat belum optimal
- c. Terbatasnya SDM yang ada di instansi

Solusi/Strategi:

- a. Pendampingan, sosialisasi, promosi dan penguatan kelembagaan forum/komunitas peduli sungai, jejaring sampah mandiri guna merubah cara pandang serta perilaku dalam usaha pengelolaan lingkungan
- b. Pembinaan terhadap penataan ijin usaha pengelolaan limbah yang dihasilkan oleh industri/pelaku usaha
- c. Mengupayakan SDM yang ada untuk tetap melakukan produktivitas kerja.

Faktor Pendukung Keberhasilan Sasaran

Adapun faktor pendukung dari keberhasilan ini adalah:

- a. Kesadaran masyarakat untuk menjalankan pola hidup sehat dan bersih di lingkungannya
- b. Kerjasama antara para pemangku kepentingan dengan masyarakat
- c. Pengelolaan sampah yang terus meningkat

SASARAN 2: MENINGKATNYA AKUNTABILITAS PD

Kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah diukur dengan indikator Nilai AKIP PD. Nilai AKIP PD yang digunakan untuk capaian pada tahun N adalah nilai AKIP PD tahun N-1.

Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:



Tabel 3.11 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3
Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	<p>Indikator ini mengukur kualitas implementasi AKIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun n-1. Nilai AKIP PD merupakan hasil akhir penjumlahan nilai tertimbang dari komponen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan kinerja bobot 30%; 2. Pengukuran kinerja bobot 30%; 3. Pelaporan Kinerja bobot 15%; 4. Evaluasi kinerja internal bobot 25%. <p>Interpretasi data: Predikat AA (Nilai >90-100) Predikat A (Nilai >80-90) Predikat BB (Nilai >70-80) Predikat B (Nilai >60-70) Predikat CC (Nilai >50-60) Predikat C (Nilai >30-50) Predikat D (Nilai >0-30)</p>

arget kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD dengan indikator kinerja Nilai AKIP PD tahun 2025 ditargetkan sebesar 82,82 dan untuk menghitung pencapaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD tahun 2025 menggunakan Nilai AKIP Tahun 2024. Berdasarkan surat dari Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 700.1.2.7/Ev-Lkj/46 tanggal 27 Maret 2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Internal pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024, Dinas Lingkungan Hidup mendapatkan nilai 82,32 (A) masuk kategori memuaskan pada hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja tahun 2024.

Tabel 3. 12 Capaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2025			
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori
1	Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	82,82	82,32	99,40	Sangat Tinggi

Dari data tersebut di atas terlihat dari target yang ditetapkan sebesar 82,82 terealisasi 82,32 sehingga capaian kinerja pada tahun 2025 sebesar 99,40%. Capaian kinerja sasaran masih di bawah target yang ditetapkan. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024, terdapat beberapa rekomendasi yang harus dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk



perbaikan implementasi SAKIP di Dinas Lingkungan Hidup Rekomendasi serta tindak lanjut yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 13 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025

NO	SARAN/REKOMENDASI	LANGKAH-LANGKAH TINDAK LANJUT
1	Agar pengumpulan data kinerja dapat mendukung capaian kinerja berdasarkan Perubahan Perjanjian Kinerja pada laporan yang akan datang	Melakukan pengumpulan data kinerja untuk mendukung capaian kinerja sebagai dasar Perubahan Perjanjian Kinerja pada pelaporan yang akan datang.
2	Agar menyajikan target kinerja dan anggaran sesuai Perubahan Perjanjian Kinerja	Akan menyajikan target kinerja dan anggaran sesuai Perubahan Perjanjian Kinerja.

Realisasi kinerja 82,32 pada tahun 2025 mengalami peningkatan jika dibandingkan pada 2023 dan 2024

Tabel 3. 14 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2023 serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di Tahun 2026

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
		2023	2024	2025		
1	Nilai AKIP PD	80,15	81,04	82,32	80,13	102,73

Dari data tersebut di atas terlihat capaian realisasi kinerja pada tahun 2023 sebesar 80,15 meningkat menjadi 81,04 pada tahun 2024 dan 82,32 pada tahun 2025.

Dari evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa realisasi kinerja terus meningkat dan capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi kinerja Nilai AKIP Sementara Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 yang sebesar 76,69 dengan kategori BB

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten terlaksana dengan baik. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 15 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	META INDIKATOR
1	Akuntabilitas kinerja PD meningkat	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	$\frac{\text{Jumlah urusan penunjang terlaksana}}{\text{Target}} \times 100\%$



Tabel 3. 16 Capaian Kinerja Program Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%) Kategori
1	Nilai AKIP PD	99,40	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100	100	100 Sangat Tinggi

Capaian kinerja program pada Sasaran Akuntabilitas Kinerja PD meningkat rata-rata 100%, sehingga masuk dalam kategori sangat tinggi.

Keberhasilan capaian Indikator program pada Sasaran Akuntabilitas Kinerja PD Meningkat tersebut didukung dari:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang di dukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; dan
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Faktor Penghambat Keberhasilan Sasaran

Faktor yang menghambat keberhasilan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul antara lain:

- a. Penyesuaian harga tiket di lapangan dengan SHBJ yang sering kali dibawah SHBJ
- b. Adanya mutasi dan pensiun ASN

Solusi/strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan pergeseran anggaran bila perlu
- b. Melakukan koordinasi dan konsultasi

Faktor Pendukung Keberhasilan Sasaran

Adapun faktor pendukung dari keberhasilan ini adalah :

- a. Upaya Pemerintah Daerah mendorong peningkatan kinerja melalui inovasi dalam pelayanan publik



Tujuan 2 Meningkatnya perlindungan pengelolaan lingkungan hidup

Tujuan kedua Dinas Lingkungan Hidup adalah Meningkatnya perlindungan pengelolaan lingkungan hidup yang diukur dengan indikator kinerja Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan. Pencapaian tujuan ini didukung dengan sasaran "Terwujudnya perlindungan pengelolaan lingkungan hidup". Sasaran menggunakan indikator kinerja yang sama sehingga capaian tujuan ini dianalisis secara terpadu dengan capaian sasaran strategis yang secara langsung mencerminkan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan.

Sasaran Terwujudnya Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kinerja sasaran terwujudnya perlindungan pengelolaan lingkungan hidup diukur dengan indikator persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan. Penjelasan hubungan sasaran, indikator, dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 17 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3
Terwujudnya Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan	Rumus : $\Sigma [(40\% \cdot \text{Persentase Program perencanaan lingkungan hidup}) + (30\% \cdot \text{Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup}) + (30\% \cdot \text{Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan pengelolaan lingkungan hidup})] \times 100\%$ Tipologi data: Non Kumulatif

Tabel 3. 18 Rumusan Perhitungan

Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3
Terwujudnya Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan	Rumus : $\Sigma [(40\% \cdot 100) + (30\% \cdot 100) + (30\% \cdot 12,05)] \times 100\%$ $= 40\% + 30\% + 3,61\%$ $= 73,61\%$ Tipologi data: Non Kumulatif

Capaian pada sasaran ini digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3. 19 Capaian Sasaran Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Meningkat

Sasaran	Indikator Kinerja	TAHUN 2025			Kategori
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Terwujudnya Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan	58,55 %	73,61%	125,72	Sangat Tinggi



Dari data tersebut di atas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar 125,72% termasuk dalam kategori sangat tinggi dengan realisasi 73,61%. Realisasi kinerja mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan tahun 2024. Apabila dibandingkan dengan target akhir renstra di tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 20 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021-2025 serta perbandingan dengan target akhir Renstra di tahun 2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja					Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
			2021	2022	2023	2024	2025		
1	Terwujudnya Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan	n/a	100%	57,05 %	58,32 %	73,61 %	65 %	113,25%

Dari evaluasi tersebut terlihat bahwa realisasi kinerja meningkat. Pencapaian target sasaran terwujudnya perlindungan pengelolaan lingkungan hidup didukung oleh program sebagai berikut:

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
2. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
3. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 21 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	META INDIKATOR
1	Terwujudnya Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase perencanaan lingkungan hidup terlaksana dengan baik	$(\sum \text{dokumen perencanaan lingkungan hidup tersusun} / \sum \text{kebutuhan dokumen lingkungan hidup}) \times 100\%$
2		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup berjalan dengan baik	$(\sum \text{pengaduan tertangani} / \sum \text{pengaduan}) \times 100\%$



NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	META INDIKATOR
3		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) terlaksana dengan baik	$(\sum \text{pelaku usaha yg dibina atau diawasi} / \sum \text{pelaku usaha yg berpotensi berdampak thd lingkungan}) \times 100\%$

Capaian kinerja program tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 3. 22 Capaian Kinerja Program

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%) Kategori
1	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan	58,55%	1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase perencanaan lingkungan hidup terlaksana dengan baik	80	100	125 Sangat Tinggi
			2. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) terlaksana dengan baik	50	12,05	24,10 Sangat Rendah
			3. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup berjalan dengan baik	100	100	100 Sangat Tinggi
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM					76,67	70,68	92,19 Sangat Tinggi

Capaian kinerja program pada sasaran Terwujudnya Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup rata-rata 92,19% sehingga masuk kategori tinggi. Keberhasilan capaian indikator didukung dari:

Untuk mengetahui capaian program selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut



Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Persentase perencanaan lingkungan hidup terlaksana dengan baik	100,00%
Indikator:	
jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup tersusun dibagi dengan	6
jumlah kebutuhan dokumen lingkungan hidup	6

Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) terlaksana dengan baik	12,05%
Indikator:	
jumlah pelaku usaha yg dibina atau diawasi dibagi dengan	30
jumlah pelaku usaha yg berpotensi berdampak thd lingkungan	249

Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan

Tabel 3. 23 Tabel Pengawasan

No.	Nama Usaha dan/atau Kegiatan	Alamat
1.	PT. MITRA SEJAHTERA SAPTOSARI	Kepek, Kepek, Saptosari, Kab. Gunungkidul
2.	PT. PUTERA JOGJA FARM	Dusun Sawahan, Bleberan, Playen, Kab. Gunungkidul
3.	CV. AMANAH SUMBER BAROKAH	Logandeng, Playen, Kab. Gunungkidul
4.	PT. HENA LANCAR KREASINDO	Bolang, Girikarto, Panggang. Kab. Gunungkidul
5.	Koperasi MINA MULYA MAJU MANDIRI	Klompok, Kalitekuk, Semin, Kab. Gunungkidul
6.	PT. LINA KURNIA HUSADA	Ngepung RT.10/ RW.03, Bunder, Patuk, Kab. Gunungkidul
7.	CV. SUMBER HARAPAN FARM	JL. Raya Wonosari-Semanu KM. 2,5 Wukirsari, Baleharjo, Wonosari, Kab. Gunungkidul
8.	PT. BIRO JAYA ABADI	Warung RT 2/ RW 9, Gedangrejo, Karangmojo, Kab. Gunungkidul
9.	PT. PRANINDA USAHA UTAMA	Jalan Sumarwi, Wonosari, Kab. Gunungkidul
10.	TULUS SUMARLAN (GESING WONDERLAND)	Pantai Gesing, Girikarto, Panggang, Kab. Gunungkidul
11.	PT. DRINI ANUGERAH DIVINA (Drini Hills)	Gedung Drini Hills Diamond Villa, Jalan Dusun Wonosobo 2, RT 007/ RW 002, Banjarejo, Tanjungsari, Kab. Gunungkidul
12.	PT. DEWATA SARI PRIMA	Ploso II, Sumberwungu, Tepus, Kab. Gunungkidul



No.	Nama Usaha dan/atau Kegiatan	Alamat
13.	WAHYU ISKANDAR	Pantai Sadranan, Sidoharjo, Tepus, Kab. Gunungkidul
14.	CV. JAYANTI SHALOM MEDIKA	karangijo wetan, RT 04, RW 04, Ponjong, Ponjong, Kab. Gunungkidul
15.	CV. BATU KATAK INDAH	DUSUN KLEPU, Karangasem, Ponjong, Kab. Gunungkidul
16.	FRANCESCO CALVIN HARSONO 56102	Ngandong RT.08/RW.00, Patuk, Patuk, Kab. Gunungkidul
17.	FRANCESCO CALVIN HARSONO 93239	Ngandong RT.08/RW.00, Patuk, Patuk, Kab. Gunungkidul
18.	OKTAV ADE SETIAWAN	Rumah Sakit Panti Rahayu , Sudimoro RT 001/RW 001, Kelor, Karangmojo, Kab. Gunungkidul
19.	PT WANGHORT PRATAMA LESTARI	JL. Raya Wonosari - Semanu Km.03 Padukuhan Wukisari Rt.Rw. 06/03, Baleharjo, Wonosari, Kab. Gunungkidul
20.	PT GIART NAPUTRI ABADI	GADING III, GUNUNGKIDUL, Gading, Playen, Kab. Gunungkidul
21.	PT MITRA BHAKTI HUSADA PRIMA	Karangmojo I RT. 04 RW. 07, Karangmojo, Karangmojo, Kab. Gunungkidul
22.	CV MULIA HATI	Karbolu RT 003/RW 008, Sumberejo, Semin, Kab. Gunungkidul
23.	PT ALAM RAYA	Ngunut Lor RT 20/RW 001, Logandeng, Playen, Kab. Gunungkidul
24.	PT SERBAINDO EDUTECHNO INTERNATIONAL	Playen 2 RT 005 RW 002, Playen, Playen, Kab. Gunungkidul
25.	Koperasi - KSPPS BMT UMMAT	JL PRAMUKA NO 36, Desa/Kelurahan Wonosari, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
26.	PT JANU PUTRA SEJAHTERA	Sumberejo Karangmojo, Karangmojo, Kab. Gunungkidul
27.	SUHANTORO	Munggur RT.004/RW.002, Ngipak, Karangmojo, Kab. Gunungkidul
28.	ALFATH TRISTA MEITIKA	JETIS RT 006/ RW 001, Jetis, Saptosari, Kab. Gunungkidul
29.	PT AMANAH HUSADA PRIMA	Karangduwet, Karangduwet, Paliyan, Kab. Gunungkidul
30.	PT AYODHYA AGRO ABADI	Karangtengah I, RT , Karangtengah, Wonosari, Kab. Gunungkidul

Sumber: Bidang Penataan dan Pentaatan Pengelolaan Perlindungan Lingkungan Hidup.

Tabel 3. 24 Tabel Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup

Dok Lingkungan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
a. UKL-UPL	25	47	48	47	27	5	7	4	2
b. Amdal/DELH	8	3	3	7	6	-	6	-	4
Jumlah									249

Sumber: Bidang Penataan dan Pentaatan Pengelolaan Perlindungan Lingkungan Hidup.



Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup berjalan dengan baik	100%
Indikator:	
jumlah pengaduan tertangani Dibagi dengan	7
jumlah pengaduan	7

REKAPITULASI PENGELOLAAN PENGADUAN LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GUNUNGKIDUL JANUARI S/D DESEMBER TAHUN 2025

No.	Pokok Pengaduan	Usaha d/a Kegiatan	Lokasi
1	Dugaan belum memiliki perizinan berusaha	PT. Gunung Citra Wisata	Wonosobo I, Kalurahan Banjarejo, Kapanewon Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul
2	Pengaduan dugaan pencemaran lingkungan disebabkan pembuangan sampah tidak pada tempatnya di Jembatan Bobong 1, Putat, Patuk	Pelaku dan pengadu pembuang sampah tidak diketahui	Jembatan Bobong 1, Putat, Patuk
3	Pengaduan dugaan pencemaran Lingkungan kegiatan pembuangan limbah tinja di Giring, Paliyan	Pelaku dan pengadu pembuang limbah tidak diketahui	Padukuhan Candi, Kalurahan Giring, Kapanewon Paliyan
4	Pengaduan dugaan pencemaran Lingkungan peternakan ayam di Wiladeg	Peternakan milik Bambang Santosa	Padukuhan Kardon Rt.3 Rw 3 Kalurahan Wiladeg, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul
5	Pengaduan kebocoran tanki pendam SPBU di Siraman	SPBU Pertamina No 44.558.07	Tegalsari 07/08 Kalurahan Siraman Kapanewon Wonosari
6	Pengaduan dugaan pencemaran pencemaran Lingkungan pembakaran sampah di Kalurahan Ngleri Playen	Kegiatan pembakaran sampah di Ngleri	Kalurahan Ngleri Kapanewon Playen
7	Pengaduan dugaan pencemaran pencemaran Lingkungan dan keberatan warga terhadap kegiatan pemotongan ayam di Karangmojo	Tempat pemotongan ayam milik Gatot Wibowo	Padukuhan Karangmojo, Kalurahan Karangmojo Kapanewon Karangmojo

Sumber: Bidang Penataan dan Pentaatan Pengelolaan Perlindungan Lingkungan Hidup.

Gambar 3.6 Kegiatan Pengawasan dan Penanganan Pengaduan





Faktor Penghambat Keberhasilan Sasaran

Faktor yang menghambat keberhasilan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul antara lain:

- a. Keterbatasan anggaran dan SDM menyebabkan jumlah pengawasan yang dilakukan hanya sedikit, tidak sebanding dengan jumlah pelaku usaha yang seharusnya diawasi
- b. Belum semua pelaku usaha taat terhadap peraturan perundang-undangan pengelolaan lingkungan hidup

Solusi/strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. mewajibkan kepada setiap pemrakarsa usaha agar membuat laporan periodik pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan
- b. mencermati dan mengkritisi atas laporan hasil pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang diterima dari pemrakarsa

Faktor Pendukung Keberhasilan Sasaran

Adapun faktor pendukung dari keberhasilan ini adalah :

- a. Komitmen dan dukungan penuh dari Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengendalian terhadap kegiatan dan/atau usaha
- b. Kerja sama antara pemerintah daerah dengan Dinas Lingkungan Hidup sehingga dokumen perencanaan pengelolaan perlindungan lingkungan hidup dapat terlaksana dengan baik

Perbandingan capaian kinerja dengan standar atau unit organisasi lain tidak dapat dilakukan karena keterbatasan ketersediaan data kinerja yang terpublikasi dan dapat diperbandingkan secara seragam antar perangkat daerah.



B. Capaian Kinerja Lainnya

Capaian kinerja lainnya dari Dinas Lingkungan Hidup antara lainnya adalah:

1. Capaian Kinerja Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada prinsip pelayanan publik ramah kelompok rentan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan.

Fasilitas penunjang pelayanan disediakan dengan memperhatikan aspek aksesibilitas, kemudahan layanan, serta kenyamanan masyarakat pengguna layanan. Upaya tersebut ditujukan untuk memberikan pelayanan yang aman dan nyaman, akses yang mudah, perlakuan yang setara dan tidak diskriminatif, serta adanya perhatian dan perlakuan khusus bagi kelompok berkebutuhan khusus.

Fasilitas pendukung pelayanan yang tersedia antara lain:

1. Bangunan Ramah Disabilitas

Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul telah dilengkapi fasilitas yang ramah disabilitas dengan:

- pintu masuk yang mudah diakses, dilengkapi dengan ramp dan pegangan rambat
- tersedianya sarana kursi roda bagi penyandang disabilitas

2. Toilet tersedia di setiap lantai gedung, terpisah untuk laki-laki dan perempuan.

3. Halaman luas yang dapat digunakan sebagai arena bermain anak maupun untuk parkir khusus yang mudah diakses

4. Kawasan tanpa rokok dengan menyediakan area merokok di luar ruang pelayanan.

5. Sarana dan prasarana konsultasi dan pengaduan

6. Penyediaan fasilitas sanitasi sebagai upaya menjaga kebersihan dan kesehatan.



Gambar 3.7. Sarana dan Prasarana Bagi Kelompok Rentan



Untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan, Dinas Lingkungan Hidup secara konsisten melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) setiap tahun. Pada tahun 2025, pengukuran IKM dilakukan terhadap tiga jenis pelayanan, yaitu:

- A. Pelayanan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan /atau perusakan Lingkungan
- B. Pelayanan Pemeriksaan Dokumen UKL-UPL dan Penerbitan Persetujuan Lingkungan
- C. Pelayanan Persetujuan Teknis Penyimpanan Limbah B3

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa nilai IKM Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 mencapai 82,31 (setelah dikonversi) dengan kategori Baik. Nilai ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun 2024 yang sebesar 81,57, menunjukkan adanya perbaikan persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.

Peningkatan nilai IKM tersebut mencerminkan bahwa upaya perbaikan pelayanan, baik dari aspek prosedur pelayanan, kejelasan informasi, maupun sikap dan responsivitas petugas, telah memberikan dampak positif terhadap tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan.

Hasil pengukuran IKM ini selanjutnya digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar perumusan langkah perbaikan pelayanan publik Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2026.



2. Capaian Kinerja Terkait dengan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan

Perspektif pengarusutamaan gender menjadi pertimbangan dan harus selalu diintegrasikan dalam kegiatan pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah. Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah tetap responsif dan sensitif terhadap kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan mempertimbangkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat bagi kelompok rentan 5 (lima) afirmatif gender yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangan 5 (lima) kelompok afirmatif gender mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh membatasi apalagi menghalangi aspirasi dan kebutuhan kelompok rentan, sesuai dengan kondisi dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup. Hal yang sama juga dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah (pemenuhan hak akses) namun tetap memperhatikan kewenangan Perangkat Daerah.

Afirmasi gender dalam program/kegiatan diterapkan mulai dari tahapan perencanaan melalui penyusunan dokumen *GAP/GBS (Gender Affirmative Program/Gender Budget Statements)* pada setiap tahapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Pemenuhan hak akses terhadap kelompok afirmatif gender juga dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup, antara lain:

- keterlibatan perempuan dalam bimtek dan sosialisasi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup seperti bimtek pengelolaan sampah, pembinaan proklam dan lain sebagainya.
- pelayanan pengambilan sampah untuk semua lapisan masyarakat
- penyediaan fasilitas taman kota untuk taman bermain anak.



Gambar 3.8. Sarana Bermain Anak di Taman Kota



C. Efisiensi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja pada tahun 2025 sebesar Rp.17.577.221.216 atau 95,76% dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 18.356.308.284,28

Anggaran dan realisasi belanja tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan tabel berikut:

Tabel 3. 25 Efisiensi Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Efisiensi (Rp.)
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	4.133.523.824,00	4.068.754.509,00	98,43	64.769.315,00
1)	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	4.133.523.824,00	4.068.754.509,00	98,43	64.769.315,00
2.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.887.011.474,28	3.472.350.827,00	89,33	414.660.647,28
1)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	58.985.000,00	57.985.075,00	98,30	999.925,00
2)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.002.081.702,00	2.612.395.188,00	87,02	389.686.514,00
3)	Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah	188.431.680,00	181.988.039,00	96,58	6.443.641,00
4)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	234.287.500,00	221.851.526,00	94,69	12.435.974,00
5)	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16.688.000,00	15.801.488,00	94,69	886.512,00
6)	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	255.915.992,28	251.758.221,00	98,38	4.157.771,28
7)	Pemeliharaan Barang Milik	130.621.600,00	130.571.290,00	99,96	50.310,00



No.	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Efisiensi (Rp.)
	Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
3.	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	38.075.000,00	37.023.800,00	99,05	1.051.200,00
1)	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	38.075.000,00	37.023.800,00	97,24	1.051.200,00
4.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.014.751.000,00	993.065.149,00	97,86	21.685.851,00
1)	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	932.551.000,00	911.517.471,00	97,74	21.033.529,00
2)	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	82.200.000,00	81.547.678,00	99,21	652.322,00
5.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.702.399.817,00	2.586.739.327,00	95,72	115.660.490,00
1)	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	2.702.399.817,00	2.586.739.327,00	95,72	115.660.490,00
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	34.750.000,00	34.416.605,00	99,04	333.395,00
1)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	34.750.000,00	34.416.605,00	99,04	333.395,00
7.	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	192.760.000,00	190.949.038,00	99,06	1.810.962,00
1)	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	192.760.000,00	190.949.038,00	99,06	1.810.962,00
8.	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	87.195.000,00	86.960.900,00	99,73	234.100,00
1)	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	87.195.000,00	86.960.900,00	99,73	234.100,00
9.	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	5.679.800,00	5.435.540,00	95,70	244.260,00



No.	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Efisiensi (Rp.)
1)	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	5.679.800,00	5.435.540,00	95,70	244.260,00
10.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	6.260.162.369,00	6.101.525.521,00	97,47	158.636.848,00
1)	Pengelolaan Sampah	6.210.162.369,00	6.051.776.521,00	97,45	158.385.848,00
2)	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	50.000.000,00	49.749.000,00	99,50	251.000,00
Jumlah Keseluruhan		18.356.308.284,28	17.577.221.216,00	95,76	779.087.068,28

Sumber data Laporan Keuangan Subbagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025

Berdasarkan tabel 3.25 di atas capaian kinerja sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul belum mencapai target kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran capaian dari total belanja operasional program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp.18.356.308.284,28 terealisasi Rp.17.577.221.216,00 atau 95,76% sehingga dapat dikatakan terdapat efisiensi Rp.779.087.068,28 atau 4,24% yang bersumber dari:

- Sisa pengadaan barang dan jasa
- Efisiensi belanja perjalanan dinas
- Efisiensi upah tenaga harian lepas
- Efisiensi belanja gaji

D. Inovasi

a. Hompimpah (Hobi Memilah dan Punguti Sampah dari Rumah)

Program HOMPIPAH yang digagas oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul untuk mengatasi permasalahan sampah. Hompimpah adalah akronim dari Hobi Memilah dan Punguti Sampah dari Rumah. Program ini sudah disosialisasikan sejak bulan maret 2023 untuk mengajak masyarakat aktif dalam mengelola sampah di rumahnya sendiri. Seperti tampak dalam gambar, Dinas Lingkungan Hidup tengah melakukan sosialisasi HOMPIPAH di Ngelo, Ngawis pada hari ini, Jumat 11 Agustus 2023.

Sesuai dengan namanya, HOMPIPAH dilakukan dengan cara memilah sampah yang ada di rumah kita. Tapi, sampah seperti apakah yang harus dipilah?



Berdasarkan sifat yang dimilikinya, sampah terbagi menjadi 3 jenis, yaitu sampah organik, sampah anorganik serta bahan berbahaya dan beracun (B3). Pada umumnya, sampah yang terdapat di rumah tangga terdiri dari sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang mudah terurai, misalnya sisa makanan, buah-buahan, daun dan lain sebagainya. Sampah anorganik adalah sampah yang lebih sulit terurai, misalnya plastic, kaleng dan kertas.

Dengan HOMPIMPAH, kita dapat memudahkan proses daur ulang. Sampah organik dapat didaur ulang menjadi kompos atau menjadi eco enzyme. Untuk mendaur ulang sampah organik menjadi eco enzyme, kita hanya perlu mencampurkan sampah organik (limbah buah/sayur), air dan gula dengan perbandingan 3:10:1 lalu tutup rapat dan biarkan selama 3 bulan. Eko Enzym ini dapat dimanfaatkan sebagai penyubur tanaman, pestisida alami dan pembersih serbaguna.

Sampah anorganik, dapat didaur ulang menjadi kerajinan. Botol bekas misalnya, dapat dibuat menjadi hiasan rumah, terompet atau tempat serbaguna. Sedangkan kertas bekas dapat dibuat menjadi tas belanja ramah lingkungan. Dan masih banyak lagi contoh yang lainnya.

Selain itu, sampah anorganik juga dapat kita bawa ke bank sampah. Sampah yang kita masukkan ke bank sampah akan ditimbang kemudian dikonversikan dalam bentuk uang. Cukup menguntungkan bukan ? Nah, tunggu apa lagi ? Dengan HOMPIMPAH, lingkungan kita semakin sehat, selain itu pendapatan kita juga meningkat. Yuk, kita HOMPIMPAH mulai sekarang !!

b. Pembentukan JPSM (Jejaring Pengelola Sampah Mandiri)

Dilatarbelakangi makin kompleksnya permasalahan sampah di Kabupaten Gunungkidul sehingga dibentuklah kelompok JPSM (Jejaring Pengelola Sampah Mandiri) yang berdiri pada 25 April 2013. Organisasi yang beranggotakan kelompok pengelola sampah mandiri di kab. Gunungkidul sebagai forum koordinasi antar kelompok pengelola sampah mandiri yang ada di kabupaten Gunungkidul, dimana bersekretariat di Sumbermulyo, Kepek, Wonosari.



Tujuan dibentuknya JPSM :

- ✓ Menumbuhkan kepedulian dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah
- ✓ Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan anggota kelompok dan meningkatkan kapasitas organisasi
- ✓ Meningkatkan jumlah dan kualitas produk pengolahan sampah
- ✓ Menambah penghasilan pengrajin/pengelola sampah
- ✓ Kegiatan JPSM antara lain:
 - ✓ Pertemuan rutin anggota jpsm
 - ✓ Pendidikan pelatihan dan studi banding pengelolaan sampah mandiri
 - ✓ Membentuk kelompok usaha dan pemasaran bersama hasil pengelolaan sampah mandiri
 - ✓ Membantu penyelesaian permasalahan terkait dengan pengelolaan sampah mandiri
 - ✓ Sosialisasi aturan hukum dan dasar ilmu pengelolaan persampahan
 - ✓ Pendampingan kelompok PSM dan memfasilitasi pembentukan kelompok PSM yang baru
 - ✓ Membangun kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka memperluas pemasaran
 - ✓ Sosialisasi "Amrih Boemi Lestari" sebagai jaringan pengelola sampah mandiri

c. Gerakan MASGUN MAOS (Masyarakat Gunungkidul Mandiri Olah Sampah)

Peluncuran Gerakan MASGUN MAOS pada tanggal 16 Desember 2025 di Bangsal Sewoko Projo oleh Bupati Gunungkidul. Gerakan MASGUN MAOS ini sebagai tindak lanjut dari HOMPIMPAH (Hoby Pilah Sampah dari Rumah), sampah yang telah terpilah antara organik dan anorganik ini selanjutnya diolah yang organik dibuat kompos dengan membuat jugangan di rumah atau ember/gallon tumpuk atau eco enzim sedangkan sampah anorganik ditabung di bank sampah. Maka sampah yang dikelola masyarakat dikelola secara mandiri.



BAB IV berisi:
A. Kesimpulan
B. Langkah Perbaikan Kinerja

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil laporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara garis besar, penyelenggaraan program kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul di tahun anggaran 2025 berjalan dengan baik. Akan tetapi, ada beberapa hal yang dapat dijadikan evaluasi untuk peningkatan program dan kegiatan di tahun selanjutnya yaitu:
 - Permasalahan lingkungan hidup yang semakin kompleks sebagai dampak pembangunan yang meningkat pesat.
 - Pemasalahan persampahan pada beberapa tahun ke depan akan menjadi permasalahan serius apabila tidak dilakukan perencanaan yang tepat dalam pengelolaannya.
 - Kebutuhan AMDAL kawasan maupun pada berbagai sektor kegiatan/usaha pembangunan, sedangkan SDM yang berkompeten di bidang AMDAL belum disiapkan secara serius.
 - Penegakan hukum masih lemah.
 - Pembangunan ekonomi yang kurang memperhatikan aspek lingkungan.
 - Masalah operasional: masalah operasional seperti proses bisnis yang tidak efisien, pemanfaatan teknologi informasi yang kurang optimal dan masalah komunikasi dapat mempengaruhi kemampuan untuk mencapai target kinerja
 - Koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dengan membangun ekosistem pemerintahan pentahelix khususnya dengan masyarakat, praktisi, kalangan akademisi dan media
2. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025 didukung dengan adanya faktor berikut:
 - Anggaran yang disediakan untuk Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan tugas pelayanannya, baik dari APBD dan Dana Keistimewaan.



- Peningkatan kinerja melalui inovasi dalam pelayanan publik
- Serta dukungan sumber daya manusia, sarana dan prasarana.

B. Langkah Perbaikan Kinerja

Untuk mengatasi hal – hal tersebut di atas maka diperlukan perencanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang efektif dan efisien di periode selanjutnya:

- 1) Melakukan identifikasi tujuan dan sasaran untuk memastikan bahwa program kegiatan sejalan dengan tugas fungsi organisasi serta dapat difokuskan pada hal yang benar – benar penting dan memiliki dampak positif kepada masyarakat
- 2) Melakukan analisis kebutuhan dan alokasi sumber daya
- 3) Pengembangan rencana aksi: pengembangan rencana aksi memastikan bahwa program kegiatan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.



LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

ꦮꦶꦏꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦶꦁꦏꦸꦁꦁꦶꦁꦠꦺꦤ꧀

Jalan Wonosari Km 03, Playen, Wonosari, Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta 55861
Telepon (0274) 391 440; Faksimile 391 440
Laman lh.gunungkidulkab.go.id ; Posel lh@gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANTONIUS HARY SUKMONO, S.T.
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH, S.E., M.P.
Jabatan : Bupati Gunungkidul
Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Playen, 04 September 2025
Pihak Kesatu,

Pihak Kedua

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH


ANTONIUS HARY SUKMONO, S.T.

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Meningkatnya Tata Kelola Lingkungan Hidup	Nilai peningkatan tata kelola Lingkungan Hidup	nilai	95,27
2.	Meningkatnya Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan	persen	58,55

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Terwujudnya tata kelola Lingkungan Hidup	Nilai peningkatan tata kelola Lingkungan Hidup	nilai	95,27
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	nilai	82,82
3.	Terwujudnya perlindungan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan	persen	58,55

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Rp 3.986.133.000,00	DANAIS
2. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.874.156.047,00	APBD
3. Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp 38.075.000,00	APBD
4. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp 1.015.101.000,00	APBD
5. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp 2.702.399.817,00	APBD
6. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp 34.750.000,00	APBD
7. Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp 192.760.000,00	APBD
8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp 87.195.000,00	APBD
9. Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp 5.679.800,00	APBD
10. Pengelolaan Persampahan	Rp 6.260.162.369,00	APBD

Playen, 04 September 2025

Pihak Kedua



ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

Pihak Kesatu,



ANTONIUS HARY SUKMONO, S.T.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

ꦭꦶꦁꦏꦸꦁꦤ꧀ꦲꦢꦶꦥꦏꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Wonosari Km.03, Playen, Wonosari, Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta 55861
Telepon (0274) 391 440; Faksimile 391 440
Laman lh.gunungkidulkab.go.id ; Posel lh@gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MADYARINA MULYANINGSIH, S.H
Jabatan : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : ANTONIUS HARY SUKMONO, S.T
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

ANTONIUS HARY SUKMONO, S.T

Playen, 01 September 2025
Pihak Kesatu,


MADYARINA MULYANINGSIH, S.H

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Tercapainya Pemenuhan Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten terlaksana dengan baik	persen	100
1.1	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	indeks	4,286
1.2	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	indeks	219,33
1.3	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	indeks	25
1.4	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah	indeks	69
1.5	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah	unit	20
1.6	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	laporan	75
1.7	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	unit	71

Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 3.874.156.047,00	APBD
1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 58.985.000,00	APBD
1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 3.000.908.467,00	APBD
1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 193.171.680,00	APBD
1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 230.787.500,00	APBD
1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 16.688.000,00	APBD
1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 226.780.000,00	APBD
1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 146.835.400,00	APBD

Playen, 04 September 2025

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,


ANTONIUS HARY SUKMONO, S.T


MADYARINA MULYANINGSIH, S.H



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
ꦩꦶꦲꦫꦶꦤꦏꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Wonosari Km.03, Playen, Wonosari, Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta 55861
Telepon (0274) 391 440; Faksimile 391 440
Laman lh.gunungkidulkab.go.id ; Posel lh@gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANA PURNANDARI, S.E

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : MADYARINA MULYANINGSIH, S.H

Jabatan : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

MADYARINA MULYANINGSIH, S.H

Playen, 04 September 2025

Pihak Kesatu,

ANA PURNANDARI, S.E

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Terselenggaranya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	4
2.	Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	dokumen	1
3.	Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	1
4.	Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	dokumen	2
5.	Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	2
6.	Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	17
7.	Terselenggaranya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	2
8.	Tertelaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/ bulan	588
9.	Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1

10.	Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	laporan	13
-----	--	---	---------	----

	Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp	14.605.000,00	APBD
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp	2.050.000,00	APBD
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp	2.000.000,00	APBD
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp	3.240.000,00	APBD
5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Rp	2.000.000,00	APBD
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp	33.140.000,00	APBD
7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	1.950.000,00	APBD
8.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	2.976.093.467,00	APBD
9.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp	2.600.000,00	APBD
10.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp	22.215.000,00	APBD

Pihak Kedua,



MADYARINA MULYANINGSIH, S.H

Playen, 04 September 2025

Pihak Kesatu,



ANA PURNANDARI, S.E



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

ꦧꦶꦏꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦠꦤ꧀ꦭꦶꦁꦏꦸꦁꦤ꧀ꦲꦶꦢꦸꦥ

Jalan Wonosari Km.03, Playen, Wonosari, Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta 55861
Telepon (0274) 391 440; Faksimile 391 440
Laman lh.gunungkidulkab.go.id ; Posel lh@gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUJARWANTO, S.IP
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : MADYARINA MULYANINGSIH, S.H
Jabatan : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

MADYARINA MULYANINGSIH, S.H

Playen,
Pihak Kesatu,

SUJARWANTO, S.IP

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUB BAGIAN UMUM SEKRETARIAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Terselenggaranya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen	12
2.	Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	3
3.	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	4
4.	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	19
5.	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	5
6.	Terselenggaranya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	laporan	12
7.	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12
8.	Terselenggaranya Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	5
9.	Terselenggaranya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	1
10.	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	12
11.	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	36
12.	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	2

13.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	13
14.	Terselenggaranya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	37
15.	Terselenggaranya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1
16.	Terselenggaranya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	20

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp 170.521.680,00	APBD
2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 22.650.000,00	APBD
3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 4.620.000,00	APBD
4. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 99.197.000,00	APBD
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 15.820.500,00	APBD
6. Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp 7.000.000,00	APBD
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 104.150.000,00	APBD
8. Pengadaan Mebel	Rp 15.288.000,00	APBD
9. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 1.400.000,00	APBD
10. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 54.670.000,00	APBD
11. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 55.110.000,00	APBD
12. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 117.000.000,00	APBD
13. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Rp 95.700.000,00	APBD

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
14. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	14.500.000,00	APBD
15. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	30.635.400,00	APBD
16. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	6.000.000,00	APBD

Pihak Kedua,



MADYARINA MULYANINGSIH, S.H

Playen, 04 April 2025
Pihak Kesatu,



BAMBANG DISTYA ARI WIBAWA, S.ST



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

ꦩꦶꦁꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦺꦤ꧀ꦠꦤ꧀ꦭꦶꦁꦏꦸꦁꦲꦶꦢꦸꦥ

Jalan Wonosari Km.03, Playen, Wonosari, Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta 55861
Telepon (0274) 391 440; Faksimile 391 440
Laman lh.gunungkidulkab.go.id ; Posel lh@gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANNA PRIHATINI DYAH PERWITASARI, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Penataan dan Pentaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : ANTONIUS HARY SUKMONO, S.T
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Playen, 04 September 2025

Pihak Kesatu,



ANTONIUS HARY SUKMONO, S.T

ANNA PRIHATINI DYAH PERWITASARI, M.Si

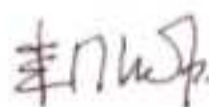
LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PENATAAN DAN PENTAATAN PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Tercapainya Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Perencanaan Lingkungan Hidup terlaksana dengan baik	persen	80
1.1	Terlaksananya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	dokumen	31
2	Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) terlaksana dengan baik	persen	50
2.1	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	indeks	31,5
3	Tercapainya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup berjalan dengan baik	persen	100
3.1	Terlaksananya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	dokumen	1

Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp 38.075.000,00	APBD
1.1 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Rp 38.075.000,00	APBD
2 Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp 34.750.000,00	APBD
2.1 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 34.750.000,00	APBD
3 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp 5.679.800,00	APBD
3.1 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Rp 5.679.800,00	APBD

Playen, 04 September 2025

Pihak Kesatu,



Pihak Kedua,



ANTONIUS HARY SUKMONO, S.T

ANNA PRIHATINI DYAH PERWITASARI, M.Si



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Wonosari Km.03, Playen, Wonosari, Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta 55861
Telepon (0274) 391 440; Faksimile 391 440
Laman lh.gunungkidulkab.go.id ; Posel lh@gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BENIDIKTUS SIHOTANG, S.TP

Jabatan : Ketua Tim Kerja Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : ANNA PRIHATINI DYAH PERWITASARI, M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Penataan dan Pentaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

ANNA PRIHATINI DYAH PERWITASARI, M.Si

Playen, 04 September 2025

Pihak Kesatu,

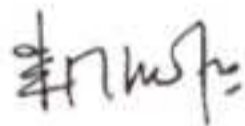
BENIDIKTUS SIHOTANG, S.TP

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KETUA TIM KERJA PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA
LINGKUNGAN HIDUP
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Terselenggaranya Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	badan usaha	63
2	Terkelolanya Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/ Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	pengaduan	6

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Rp 34.750.000,00	APBD
2. Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Rp 5.679.800,00	APBD

Pihak Kedua,



ANNA PRIHATINI DYAH PERWITASARI, M.Si

Playen, 04 September 2025

Pihak Kesatu,



BENIDIKTUS SIHOTANG, S.TP



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

ꦧꦶꦏꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦤ꧀ꦭꦶꦁꦏꦸꦁꦤ꧀ꦲꦶꦢꦸꦥ

Jalan Wonosari Km.03, Playen, Wonosari, Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta 55861
Telepon (0274) 391 440; Faksimile 391 440
Laman lh.gunungkidulkab.go.id ; Posel lh@gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JOKO UNTORO, S.T

Jabatan : Ketua Tim Kerja Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : ANNA PRIHATINI DYAH PERWITASARI, M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Penataan dan Pentaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

ANNA PRIHATINI DYAH PERWITASARI, M.Si

Playen, 04 September 2024

Pihak Kesatu,

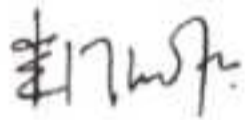
JOKO UNTORO, S.T

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KETUA TIM KERJA PERENCANAAN DAN KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	dokumen	30

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Rp 38.075.000,00	APBD

Pihak Kedua,



ANNA PRIHATINI DYAH PERWITASARI, M.Si

Playen, 04 September 2024

Pihak Kesatu,



JOKO UNTORO, S.T.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

ꦩꦶꦁꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦁꦠꦤ꧀ꦩꦏꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Wonosari Km.03, Playen, Wonosari, Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta 55861
Telepon (0274) 391 440; Faksimile 391 440
Laman lh.gunungkidulkab.go.id ; Posel lh@gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EKO SUHARSO PRIHANTORO, S.T.,M.T
Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengembangan Kapasitas

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : ANTONIUS HARY SUKMONO, S.T
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Playen, 04 September 2025

Pihak Kesatu,

EKO SUHARSO PRIHANTORO, S.T.,M.T



ANTONIUS HARY SUKMONO, S.T

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN
PENGEMBANGAN KAPASITAS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Terlaksananya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pengendalian Pencemaran	persen	65
1.1	Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten /Kota	dokumen	2
2	Terlaksananya Peningkatan, Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Lembaga/Kelompok Masyarakat yang Peduli terhadap Lingkungan Hidup	persen	72
2.1	Terselenggaranya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	indeks	85,67
3	Terlaksananya Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Lomba Lingkungan Hidup	persen	58
3.1	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah entitas Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	entitas	6
4	Terlaksananya Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah Dikelola	persen	29
4.1	Terlaksananya Pengelolaan Sampah	Indeks Pengelolaan Sampah	indeks	5.718,38
4.2	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Jumlah unit Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh Pihak swasta	unit	1

Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp 932.101.000,00	APBD
1.1 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp 932.901.000,00	APBD
2. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp 192.760.000,00	APBD
2.1 Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 192.760.000,00	APBD
3. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp 87.195.000,00	APBD
3.1 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 87.195.000,00	APBD
4. Program Pengelolaan Persampahan	Rp 320.655.000,00	APBD
4.1 Pengelolaan Sampah	Rp 270.655.000,00	APBD
4.2 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Rp 50.000.000,00	APBD

Pihak Kedua,



ANTONIUS HARY SUKMONO, S.T

Playen, 04 September 2024

Pihak Kesatu,



EKO SUHARSO PRIHANTORO, S.T., M.T



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

ꦏꦸꦁꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦤ꧀ꦭꦶꦁꦏꦸꦁꦁꦲꦶꦥ

Jalan Wonosari Km.03, Playen, Wonosari, Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta 55861
Telepon (0274) 391 440; Faksimile 391 440
Laman ih.gunungkidulkab.go.id ; Posel ih@gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FITRI ISWINAYU, S.T.,M.Sc
Jabatan : Ketua Tim Kerja Pengendalian Pencemaran

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : EKO SUHARSO PRIHANTORO, S.T.,M.T
Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengembangan Kapasitas

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

EKO SUHARSO PRIHANTORO, S.T.,M.T

Playen, 04 September 2025

Pihak Kesatu,

FITRI ISWINAYU, S.T.,M.Sc

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KETUA TIM KERJA PENGENDALIAN PENCEMARAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	dokumen	1

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Rp 312.475.000,00	APBD

Pihak Kedua,



EKO SUHARSO PRIHANTORO, S.T.,M.T

Playen, 04 September 2024

Pihak Kesatu,



FITRI ISWINAYU, S.T.,M.Sc



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

ꦩꦶꦁꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦺꦤ꧀ꦠꦶꦩꦶꦁꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Wonosari Km.03, Playen, Wonosari, Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta 55861
Telepon (0274) 391 440; Faksimile 391 440
Laman lh.gunungkidulkab.go.id ; Posel lh@gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DWI WIYANI, S.T.,M.Eng
Jabatan : Ketua Tim Kerja Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : EKO SUHARSO PRIHANTORO, S.T.,M.T
Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengembangan Kapasitas

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

EKO SUHARSO PRIHANTORO, S.T., M.T

Playen, 04 September 2025

Pihak Kesatu,

DWI WIYANI, S.T.,M.Eng

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KETUA TIM KERJA PENGEMBANGAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Terselenggaranya Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	dokumen	4
2.	Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/komunitas/ kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/komunitas /kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	lembaga	2
3.	Terselenggaranya Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan /Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	entitas	6
4.	Terselenggaranya Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	kelompok	7
5.	Terselenggaranya Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit/Usaha/ Swasta/ Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	unit	1

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Rp 38.410.000,00	APBD
2. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Rp 137.830.000,00	APBD
3. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Rp 87.195.000,00	APBD
4. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Rp 270.655.000,00	APBD
5. Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Rp 50.000.000,00	APBD

Pihak Kedua,



EKO SUHARSO PRIHANTORO, S.T.,M.T

Playen, 04 September 2024

Pihak Kesatu,



DWI WIYANI, S.T.,M.Eng



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

ꦩꦶꦁꦭꦶꦁꦏꦸꦁꦁꦶꦢꦸꦭꦶꦁꦏꦸꦁꦁꦶꦢꦸꦭ

Jalan Wonosari Km.03, Playen, Wonosari, Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta 55881
Telepon (0274) 391 440; Faksimile 391 440
Laman lh.gunungkidulkab.go.id ; Posel lh@gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HANA KADATON ADINOTO, S.P.,M.P
Jabatan : Kepala Bidang Konservasi dan Kerusakan Lahan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : ANTONIUS HARY SUKMONO, S.T
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


ANTONIUS HARY SUKMONO, S.T

Playen, 04 September 2025
Pihak Kesatu,


HANA KADATON ADINOTO, S.P.,M.P

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG KONSERVASI DAN KERUSAKAN LAHAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Kualitas lingkungan hidup meningkat	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang terlaksana dengan baik	persen	75
		Persentase Pengendalian Pencemaran	persen	65
		Persentase RTH Publik dalam kondisi baik	persen	56
		Persentase Lembaga/Kelompok Masyarakat yang Peduli terhadap Lingkungan Hidup	persen	72

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Rp 3.986.133.000,00	DANAIS
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp 82.200.000,00	APBD
3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp 1.458.712.145,00	APBD
4. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp 16.520.000,00	APBD

Pihak Kedua,


ANTONIUS HARY SUKMONO, S.T

Playen, 04 September 2024
 Pihak Kesatu,


HANA KADATON ADINOTO, S.P.,M.P



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

ꦩꦶꦏꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦺꦤ꧀

Jalan Wonosari Km.03, Playen, Wonosari, Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta 55861
Telepon (0274) 391 440; Faksimile 391 440
Laman lh.gunungkidulkab.go.id ; Posel lh@gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ERNA ISMAWARSIH, S.P.,M.Eng
Jabatan : Ketua Tim Kerja Konservasi Sumber Daya Alam

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : HANA KADATON ADINOTO, S.P.,M.P
Jabatan : Kepala Bidang Konservasi dan Kerusakan Lahan

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

HANA KADATON ADINOTO, S.P.,M.P

Playen, 04 September 2025

Pihak Kesatu,

ERNA ISMAWARSIH, S.P.,M.Eng

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KETUA TIM KERJA KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	dokumen	3
2	Terselenggaranya Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	laporan	2
3	Terkelolanya Kebun Raya	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	9
4	Terkelolanya Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	1,02
5	Terkelolanya Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	unit	3
6	Terkelolanya Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	unit	5
7	Terselenggaranya Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	orang	160

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	Rp 3.986.133.000,00	DANAIS
2. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Rp 82.200.000,00	APBD
3. Pengelolaan Kebun Raya	Rp 00,00	APBD
4. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rp 1.334.492.145,00	APBD
5. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Rp 21.920.000,00	APBD
6. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Rp 102.300.000,00	APBD
7. Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Rp 16.520.000,00	APBD

Pihak Kedua,



HANA KADATON ADINOTO, S.P.,M.P

Playen, 04 September 2025

Pihak Kesatu,



ERNA ISMAWARSIH, S.P.,M.Eng

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA UPT KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Terlaksananya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase RTH Publik dalam Kondisi Baik	persen	56
1.1	Terlaksananya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah luas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Ha	35,02
2	Terlaksananya Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah dikelola	persen	29
2.1	Terlaksananya Pengelolaan Sampah	Indeks Pengelolaan Sampah	indeks	5.718,38

Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp 1.243.687.672,00	APBD
1.2 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Rp 1.243.687.672,00	APBD
2 Program Pengelolaan Persampahan	Rp 5.939.507.369,00	APBD
2.1 Pengelolaan Sampah	Rp 5.939.507.369,00	APBD

Pihak Kedua,



ANTONIUS HARY SUKMONO, S.T

Playen, 04 September 2024

Pihak Kesatu,

HERI KUSWANTORO, S.Hut



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

ꦠꦶꦁꦭꦶꦁꦏꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦶꦁꦏꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Wonosari Km.03, Playen, Wonosari, Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta 55861
Telepon (0274) 391 440; Faksimile 391 440
Laman lh.gunungkidulkab.go.id ; Posel lh@gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SRIYONO S.IP

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Kebersihan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : HERI KUSWANTORO, S.Hut

Jabatan : Kepala UPT Kebersihan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

HERI KUSWANTORO, S.Hut

Playen,

Pihak Kesatu

SRIYONO S.IP

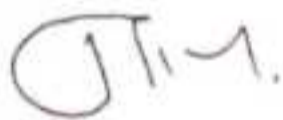
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KASUBBAG TU UPT KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

JA
25

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Terselenggaranya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	ha	1,02
2.	Terselenggaranya Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	ton	16.770,24

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rp 1.243.687.672,00	APBD
2. Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Rp 5.939.507.369,00	APBD

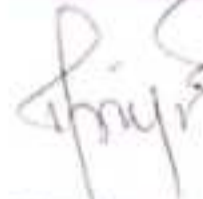
Pihak Kedua,



HERI KUSWANTORO, S.Hut

Playen,

Pihak Kesatu,



SRIYONO S.IP



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

ꦩꦶꦁꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦶꦁꦸꦁꦤꦶꦁꦲꦶꦢꦸꦥ

Jalan Wonosari Km.03, Playen, Wonosari, Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta 55861
Telepon (0274) 391 440; Faksimile 391 440
Laman lh.gunungkidulkab.go.id ; Posel lh@gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IKA PUJI ASTUTI, S.ST.,MPA
Jabatan : Kepala UPT Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : ANTONIUS HARY SUKMONO, S.T
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

ANTONIUS HARY SUKMONO, S.T

Playen, 4 September 2025
Pihak Kesatu,



IKA PUJI ASTUTI, S.ST.,MPA

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Terlaksananya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pengendalian Pencemaran	persen	65
1.1	Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	dokumen	2

Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp 620.426.000,00	APBD
1.1 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp 620.426.000,00	APBD

Playen, 4 September 2025
 Pihak Kesatu,



ANTONIUS HARY SUKMONO, S.T



IKA PUJI ASTUTI, S.ST.,MPA



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

ꦩꦶꦏꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦠꦏꦏ

Jalan Wonosari Km.03, Playen, Wonosari, Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta 55861
Telepon (0274) 391 440; Faksimile 391 440
Laman lh.gunungkidulkab.go.id ; Posel lh@gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YOSHI INDRANINGRUM A.Md.
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Laboratorium Lingkungan
Dinas Lingkungan Hidup

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : IKA PUJI ASTUTI, S.ST.,MPA
Jabatan : Kepala UPT Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

IKA PUJI ASTUTI, S.ST.,MPA

Playen,

Pihak Kesatu,

YOSHI INDRANINGRUM A.Md.



LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KASUBBAG TU UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Terkelolanya Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	dokumen	3

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Rp 620.426.000,00	APBD

Pihak Kedua,

IKA PUJI ASTUTI, S.ST.,MPA

Playen,

Pihak Kesatu,

YOSHI INDRANINGRUM A.Md.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
INSPEKTORAT DAERAH

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦁ

Jalan Taman Bhakti 2B Wonosari Gunungkidul 55812

Telepon (0274) 391539, Faksimile (0274) 391539

Posel : inspektorat@gunungkidulkab.go.id Laman : inspektorat.gunungkidulkab.go.id

Wonosari, 27 Maret 2025

Nomor : 76.1.27/Ev.Lkj/ub
Sifat : Rahasia
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) Internal pada
Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Gunungkidul Tahun
2024

Yth. Sekretaris Daerah
Kabupaten Gunungkidul
di
Wonosari

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Bupati Nomor 164/KPTS/2024 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Surat Perintah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 000.8.7.3/33/2025, serta Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 01/ITDA-Ev.LKj/III/2025 tanggal 5 Maret 2025, kami telah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Internal pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 mulai tanggal 5 Maret sampai dengan 18 Maret 2025 dengan hasil sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Latar Belakang Evaluasi

Latar belakang dilakukannya evaluasi AKIP internal Perangkat Daerah adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Evaluasi AKIP internal ini diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

3. Tujuan Evaluasi

Tujuan dilaksanakannya evaluasi AKIP internal adalah:

- a. memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- b. menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
- e. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi AKIP internal mencakup antara lain:

- a. penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- b. penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- c. penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya; dan
- d. penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

5. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP internal adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan).

Penilaian dilakukan pada komponen dan sub-komponen evaluasi AKIP internal, setiap sub-komponen dinilai berdasarkan kriteria pemenuhan dokumen, kualitas dan pemanfaatan. Setiap sub-komponen akan dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, gambaran kriteria sesuai dengan gradasi nilai sebagai berikut:

- a. Penilaian Keberadaan

Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
AA	100	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir.
A	90	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 1 tahun terakhir.
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.

Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

b. Penilaian Kualitas dan Pemanfaatan

Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
AA	100	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.
A	90	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

Setiap sub-komponen kriteria yang telah diberikan nilai dalam pemenuhan kriteria harus dilengkapi dengan catatan berupa keterangan beserta bukti daftar dokumen yang mendukung dan relevan.

Nilai pada sub-komponen yang telah terisi akan terakumulasi sehingga diperoleh nilai total (hasil akhir) di setiap komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai >90-100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B (Nilai > 60 – 70)	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.

Predikat	Interpretasi
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C (Nilai > 30 – 50)	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

6. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Sedangkan tugas pokok dan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang lingkungan hidup.

7. Gambaran Umum Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

8. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Laporan Hasil Monitoring Nomor 700.1.2.7/SKIP/09 tanggal 16 Juli 2024, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul telah menindaklanjuti semua rekomendasi hasil evaluasi AKIP Internal Tahun 2023.

B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

Hasil evaluasi AKIP internal Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul menunjukkan bahwa nilai sebesar **82,32** dengan predikat **A**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "Memuaskan" yaitu terdapat gambaran bahwa Perangkat Daerah dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.

Rincian hasil evaluasi internal tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2023	2024
1. Perencanaan Kinerja	30	25,70	25,20
2. Pengukuran Kinerja	30	23,16	24,07
3. Pelaporan Kinerja	15	12,34	11,94
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,85	21,10
Nilai Hasil Evaluasi	100	81,04	82,32
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A	A

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mencakup Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Dokumen Rencana Strategis (Renstra), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan, Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai dan Dokumen Rencana Aksi atas Kinerja.

2. Pengukuran Kinerja

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan pengukuran kinerja mencakup mekanisme pengukuran kinerja mulai dari pengumpulan data kinerja, keterlibatan pimpinan dalam mengukur capaian kinerja hingga pemanfaatannya.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja yaitu pengumpulan data kinerja belum mendukung capaian kinerja yang diharapkan sesuai dengan perubahan perjanjian kinerja.

3. Pelaporan Kinerja

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2024 mencakup pemenuhan pelaporan kinerja, penyampaian, publikasi, penyajian informasi kinerja dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja penyajian target kinerja dan anggaran tahunan belum disesuaikan dengan target kinerja dan anggaran dalam Perubahan Perjanjian kinerja

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mencakup pemenuhan tindak lanjut hasil evaluasi internal dan pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan kinerja di masa yang akan datang.

C. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul terdapat beberapa hal yang disarankan/direkomendasikan untuk perbaikan di masa yang akan datang dan meningkatkan efektivitas penerapan akuntabilitas kinerja, yaitu:

1. Perencanaan Kinerja

Tidak terdapat rekomendasi.

2. Pengukuran Kinerja

Agar pengumpulan data kinerja dapat mendukung capaian kinerja mendasarkan Perubahan Perjanjian Kinerja pada pelaporan yang akan datang.

3. Pelaporan Kinerja

Agar menyajikan target kinerja dan anggaran sesuai Perubahan Perjanjian Kinerja

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Tidak terdapat rekomendasi.

D. PENUTUP

1. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik

Dalam rangka peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka Perangkat Daerah harus berkomitmen dan secara konsisten melakukan evaluasi untuk meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan target capaian kinerja yang telah direncanakan.

2. Apresiasi

Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan evaluasi.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024, mohon menjadikan periksa.

Inspektur,

Saptoyo, S.Sos, M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 197103251991011001


Tembusan:

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan); dan
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul.



DLH

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

 **0274 391440**